

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR
NOMOR HK.02.02.15B.12.25.96 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR
TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Bogor tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI BOGOR TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI BOGOR TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Bogor Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Bogor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Bogor memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Bogor untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai POM di Bogor sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Bogor dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan

- b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Bogor.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Desember 2025
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BOGOR,



JEFFETA PRADEKO PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BOGOR
NOMOR HK.02.02.15B.12.25.96 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BOGOR TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. untuk menunjang pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah NKRI Badan POM memiliki 76 (tujuh puluh enam) yang UPT BPOM terdiri atas:

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebanyak 23 UPT, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
2. Balai Pengawas Obat dan Makanan sebanyak 30 UPT, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
3. Loka Pengawas Obat dan Makanan sebanyak 23 UPT, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Balai POM di Bogor merupakan salah satu UPT BPOM yang ditetapkan melalui peningkatan status kelembagaan dari Loka POM Bogor menjadi Balai POM di Bogor pada tahun 2023 sebagai tindak lanjut kebijakan penataan organisasi UPT BPOM. Peningkatan status ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan POM sebagai implementasi Peraturan BPOM tentang klasifikasi dan organisasi UPT. Sejak peningkatan statusnya, Balai POM di Bogor menjalankan fungsi yang

lebih luas dan komprehensif dalam pengawasan Obat dan Makanan, termasuk penyediaan layanan laboratorium dan penguatan fungsi penindakan.

Balai POM di Bogor merupakan salah satu UPT Badan POM yang memiliki 2 (dua) kantor yang beralamat di Jalan Raya Bogor No 27B, Nanggewer, Cibinong, Kabupaten Bogor 16912 dan Jalan KSR Dadi Kusmayadi RT 04/06, Cibinong, Kabupaten Bogor 16912 memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan wilayah kerja Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Balai POM di Bogor juga memiliki layanan tatap muka langsung di Kantor 1, Jalan Raya Bogor No 27B, Nanggewer, Cibinong, Kabupaten Bogor 16912 di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bogor.



Gambar 1.1 Wilayah Kerja Balai POM di Bogor

Secara administratif, luas wilayah kerja Balai POM di Bogor sebesar 3.303,06 km² (tiga ribu tiga ratus tiga koma nol enam kilometer persegi), meliputi 1 (satu) kabupaten dan 2 (dua) kota. Adapun jumlah penduduk yang tersebar di wilayah tersebut sejumlah 8.973.400 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus) jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang diperbaharui di Februari 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk (BPS, 2025)

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (Ribu)
1	Kabupaten Bogor.	2.991,78	5.721,6
2	Kota Bogor.	111,37	1.083,8
3	Kota Depok.	199,91	2.168,0

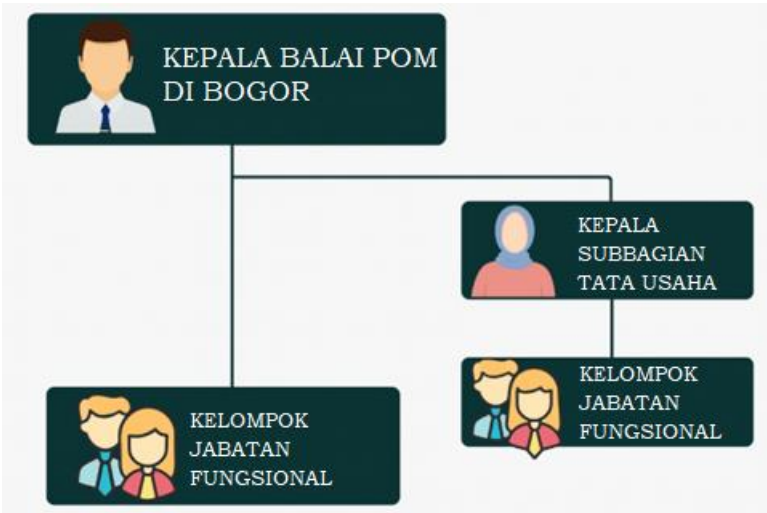
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan

Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan Masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Struktur organisasi dan tata kerja Balai POM di Bogor mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Secara struktural, Balai POM di Bogor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya, dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Untuk mendukung tugas dan fungsinya, Balai POM di Bogor mempunyai susunan organisasi, yaitu:

- a. Kepala;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Bogor

Penyusunan Rencana Strategis Balai POM di Bogor Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menjadi pedoman strategis bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode lima tahun mendatang, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2025–2029. Renstra ini juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pengawasan, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta menjawab dinamika tantangan di bidang pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok.

1.1.1 Capaian Kinerja Renstra Balai POM di Bogor Tahun 2020–2024

Tabel 1.2 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai POM di Bogor Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja UPT.															
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.	80	100	125	97	79,72	82,19	98	80,84	82,91	98	97,85	99,85	98,5	95,18	96,63
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.	75	100	133,33	85	66,67	78,44	87	94,44	108,55	89	95,56	107,37	91	91,84	100,92
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan.	85	100	117,65	94	71,43	75,99	95	76,56	80,59	95,5	96,85	101,41	96	90,77	94,55
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan.	80	100	125	80	71,88	89,85	82	82,35	100,43	83	83,33	100,4	92,8	65,38	70,45
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat.										74	86,67	117,12	85	85	100
SK2: Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja UPT.															
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan.	87	110,15	126,61	96	88,13	91,80	97	98,35	101,39	99	99,42	100,42	100	100	100

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan.	55	101,55	184,64	60	63,8	106,33	65	65,93	101,43	70	77,57	110,81	75	87,64	116,85
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu.	85	52,72	62,02	88	89,03	101,17	90	72,1	80,11	92	94,47	102,68	94	100	106,38
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.	50	130,61	261,22	67	69,64	103,94	71	86,21	121,42	75	76,12	101,49	79	79,52	100,66
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.	60	113,61	189,35	75	79,66	106,21	77	83,78	108,81	79	80,05	101,33	80	81,46	101,83
Indeks Pelayanan Publik.													3,55	3,89	109,58
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik.							77	100	129,87	79	100	126,58	100	100	100

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi / Kabupaten / Kota.													95	99,67	104,92
SK3: Meningkatkan Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja UPT.															
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.	70	91,11	130,16	90	90,8	100,89	90,9	93,11	102,43	91,8	92,35	100,6	93,2	93,29	100,1
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.													6	6	100
Jumlah Desa Pangan Aman.													1	1	100
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.													1	1	100
SK4: Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja UPT.															
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar.	100	100	100	50	77,02	154,04	50	50	100	50	60	120	50	50	100
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa	100	100	100	50	68,75	137,50	50	50	100	50	60	120	50	50	100

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
dan Diuji Sesuai Standar.															
SK5: Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja UPT.															
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.	65	66,15	101,77	70	66,88	95,54	74	55,63	75,18	78	83,13	106,58	82	100	121,95
SK6: Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan.															
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP.													40	54,04	135,1
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal.							2,25	2,5	111,11	2,5	3	120	3	3,6	120
SK7: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan.															
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu.													88,67	87,39	98,56
SK8: Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.															
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan													94,6	99,32	104,99

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan.															
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.													82,63	84,91	102,76
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT.													89,75	91,6	102,06
SK9: Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan UPT yang Optimal.															
Presentase Implementasi Rencana Aksi RB.	81	100	123,46	85	96,77	113,85	85	100	117,65	100	100	100			
Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu.	100	100	100	100	97,77	97,77									
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu.				100	100	100									
Indeks RB UPT.													75	76	101,33
Nilai AKIP UPT.							80,6	75,42	93,57	82,2	77,57	94,37	79,43	79,02	99,48
Nilai Pengelolaan Kearsipan.													83,24	93,66	112,52

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK10: Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal.															
Indeks Profesionalitas ASN UPT.	75	85	113,33	85,2	84,71	99,42	85,4	85,5	100,12	85,6	90,03	105,18	90,16	87,42	96,96
SK11: Terkelolanya Keuangan UPT Secara Akuntabel.															
Nilai Kinerja Anggaran UPT.				90	86,88	96,53	90,6	91,58	101,08	91,8	90,05	98,09	91,8	84,83	92,41
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT.	88	100	113,64	92	108,69	118,14									
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa.													97,74	100	102,31
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara.													91	91,76	100,84
Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.													60	83,3	138,83

Sumber: Renstra Loka POM di Bogor Tahun 2021-2024 dan Laporan Kinerja Balai POM di Bogor Tahun 2021, 2022, 2023, 2024

Balai POM di Bogor tahun 2020-2024 memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 38 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. SK1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja UPT

Sasaran ini menggambarkan keberhasilan Balai POM di Bogor dalam menjamin keamanan, mutu, dan pemenuhan standar produk obat serta makanan yang beredar di wilayah kerja. Kinerja SK1 menjadi fondasi utama efektivitas sistem pengawasan *post-market* dan indikator kualitas layanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan.



Gambar 1.3 Tren Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Capaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2020 yang mencapai 125% merupakan dampak dari tingginya proporsi sampel obat yang memenuhi standar mutu serta adanya kebijakan prioritas pengawasan selama masa pandemi, di mana sebagian besar produk obat yang disampling merupakan kategori berisiko rendah. Namun, pada 2021 terjadi penurunan signifikan menjadi 82,19%, sejalan dengan meningkatnya jumlah temuan ketidaksesuaian mutu, khususnya pada produk-produk yang diproduksi oleh industri skala kecil serta obat tradisional yang beredar luas di wilayah Kabupaten Bogor. Pada 2022 capaian relatif stabil sebesar 82,91%, menunjukkan masih adanya tantangan terkait variasi kualitas produk obat di lapangan. Peningkatan signifikan terjadi pada 2023 menjadi 99,85%, didorong oleh penguatan sampling berbasis risiko, peningkatan pembinaan industri obat tradisional dan UMOT, serta intensifikasi *post-market surveillance*. Pada 2024 capaian sedikit menurun menjadi 96,63%, namun masih menunjukkan kinerja yang sangat baik. Penurunan ini berkaitan dengan ditemukannya beberapa produk yang tidak memenuhi syarat uji mutu

laboratoris, khususnya terkait parameter cemaran mikroba. Secara keseluruhan, tren 2020–2024 menggambarkan efektivitas pengawasan yang semakin terkendali, dengan perbaikan signifikan pasca 2021–2022 akibat penerapan pengawasan berbasis risiko yang lebih ketat di Balai POM di Bogor.



Gambar 1.4 Tren Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Capaian Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2020 mencapai 133,83% terjadi karena banyaknya sampel pangan yang memenuhi syarat pada kelompok pangan olahan berisiko rendah serta masifnya pembinaan industri rumah tangga pangan (IRTP) di masa pandemi. Akan tetapi, pada 2021 capaian turun drastis menjadi 78,44%, sejalan dengan meningkatnya temuan penyimpangan label, penggunaan bahan tambahan pangan tidak sesuai ketentuan, serta banyaknya UMKM pangan baru yang belum sepenuhnya memahami standar keamanan pangan. Mulai 2022 hingga 2023, capaian kembali meningkat di atas 100% yaitu 108,55% dan 107,37% akibat penerapan strategi *risk-based* sampling, intensifikasi program PJAS Aman, serta penguatan pembinaan IRTP di wilayah kerja Balai POM di Bogor. Pada 2024 capaian tetap di atas target sebesar 100,92%, meskipun terdapat sejumlah temuan pada pangan siap saji dan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang berdampak pada sedikit penurunan angka total. Tren ini menunjukkan bahwa intervensi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Balai POM di Bogor efektif, khususnya terhadap IRTP dan pangan jajanan sekolah, meskipun tantangan pada sektor PSAT dan pangan siap saji tetap memerlukan perhatian.



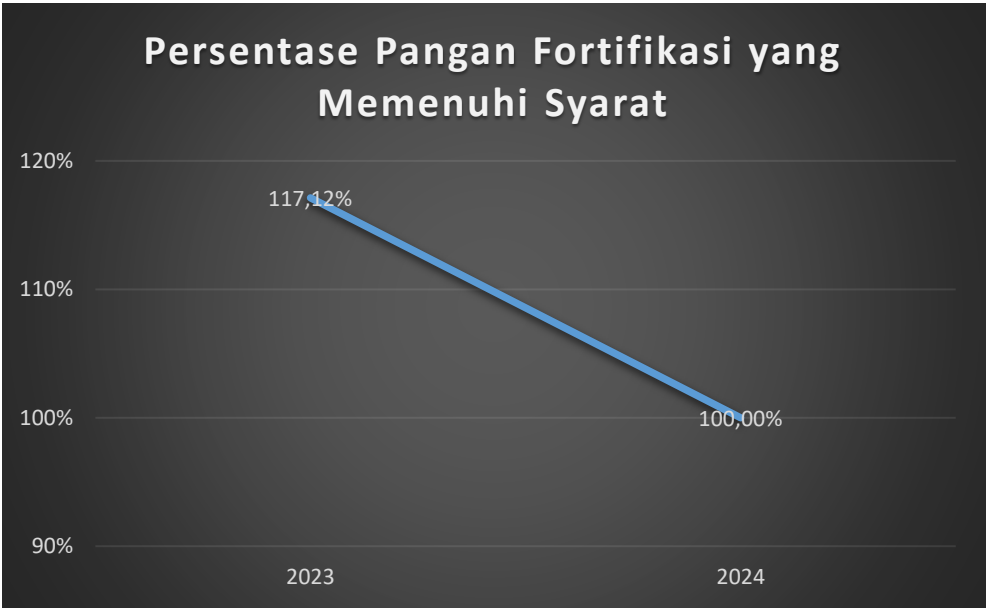
Gambar 1.5 Tren Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan ini menunjukkan kualitas obat beredar secara umum, termasuk aspek keamanan, mutu, dan penandaan. Tahun 2020 menghasilkan capaian sangat tinggi karena rendahnya temuan obat ilegal dan obat tidak memenuhi mutu selama pandemi. Namun pada 2021 terjadi penurunan drastis menjadi 75,99%, akibat meningkatnya peredaran obat tradisional ilegal dan obat tanpa izin edar yang banyak ditemukan di toko obat dan outlet ritel di Kabupaten Bogor. Pada 2022 terdapat sedikit perbaikan menjadi 80,59%, didukung oleh intensifikasi operasi penindakan dan pembinaan terhadap sarana distribusi. Tahun 2023 capaian kembali meningkat signifikan menjadi 101,41% setelah implementasi intensifikasi operasi penyelidikan dan penindakan terpadu, serta peningkatan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Pada 2024 capaian sedikit menurun ke 94,55% akibat ditemukannya ketidaksesuaian penandaan dan mutu pada beberapa kategori obat tradisional dan suplemen kesehatan. Secara umum, indikator ini menunjukkan bahwa risiko peredaran obat ilegal tetap tinggi, namun upaya mitigasi Balai POM di Bogor sangat berpengaruh dalam meningkatkan capaian 2022–2024.



Gambar 1.6 Tren Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2020 sangat tinggi karena lemahnya aktivitas industri selama pandemi yang menyebabkan rantai distribusi pangan relatif stabil, sehingga temuan penyimpangan relatif rendah. Pada 2021 capaian turun ke 89,85% akibat meningkatnya usaha pangan mikro yang tumbuh pasca-pandemi namun belum sepenuhnya memahami standar keamanan pangan. Pada 2022–2023 capaian kembali stabil di atas 100% sebesar 100,43% dan 100,4% sebagai hasil dari pembinaan intensif IRTP, program PJAS Aman, dan operasi rutin pemeriksaan sarana distribusi pangan. Namun, pada 2024 terjadi penurunan signifikan menuju 70,45%, dipengaruhi oleh meningkatnya temuan ketidaksesuaian pada PSAT, pangan siap saji, serta meningkatnya jumlah UMKM pangan baru yang belum terstandarisasi. Lonjakan temuan ini sejalan dengan perluasan cakupan sampling dan meningkatnya jumlah produk baru di pasar. Penurunan ini menjadi *early warning* bahwa diperlukan penguatan pengawasan PSAT, peningkatan edukasi konsumen, dan intensifikasi pembinaan IRTP.



Gambar 1.7 Tren Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat mulai diukur pada 2023 dengan capaian sangat tinggi sebesar 117,12%, kemudian mencapai 100% pada 2024. Pada tahap awal, capaian tinggi disebabkan oleh fokus pengawasan pada produsen besar yang telah lama menerapkan fortifikasi sesuai standar. Tahun 2024 capaian stabil di angka target setelah cakupan pengawasan diperluas ke produsen menengah dan kecil yang masih dalam tahap adaptasi. Hasil dua tahun pengawasan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai POM Bogor telah berjalan baik. Penurunan capaian dari 2023 ke 2024 menggambarkan dinamika normal dalam proses perluasan pengawasan ke kelompok pelaku usaha baru, dan bukan menandakan penurunan efektivitas program.

Secara umum, capaian SK1 selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang kuat pada seluruh indikator hingga 2023, dengan sedikit penurunan pada 2024 yang disebabkan oleh perluasan cakupan dan peningkatan ketatnya parameter pengujian. Kinerja tertinggi pada 2023 mencerminkan optimalisasi pengawasan berbasis risiko, peningkatan kapasitas laboratorium, serta efektivitas pembinaan pelaku usaha. Meskipun tahun 2024 menunjukkan penurunan pada beberapa indikator, hal ini lebih menggambarkan transisi fase pengawasan menuju skala yang lebih luas dan komprehensif. Dengan demikian, SK1 dapat disimpulkan telah berhasil mencapai tujuan strategisnya yaitu menjamin obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja Balai POM Bogor aman, bermutu, dan memenuhi standar yang ditetapkan.

2. SK2: Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja UPT

Sasaran kegiatan ini berfokus pada peningkatan efektivitas pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, serta penguatan pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Capaian SK2 mencerminkan kemampuan Balai POM di Bogor dalam menjalankan fungsi pengawasan lapangan, tindak lanjut hasil inspeksi, dan pembinaan pelaku usaha agar seluruh proses produksi dan distribusi berjalan sesuai ketentuan.



Gambar 1.8 Tren Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Kinerja indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam periode 2020–2024. Pada tahun 2020, capaian berada pada tingkat sangat tinggi, yaitu 126,61%, yang mencerminkan tingginya jumlah keputusan atau rekomendasi yang berhasil ditindaklanjuti dibandingkan target. Capaian ini umumnya terjadi ketika pengawasan difokuskan pada sarana produksi dan distribusi yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi serta sistem dokumentasi yang sudah matang, sehingga proses penyelesaian rekomendasi berjalan cepat. Pada tahun 2021, capaian menurun cukup tajam menjadi 91,80%. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari semakin luasnya cakupan inspeksi, termasuk sarana dengan tingkat kepatuhan yang lebih beragam atau adanya kendala operasional seperti pandemi yang memperlambat proses tindak lanjut. Kondisi ini masih berada dalam kisaran wajar mengingat dinamika perubahan situasi lapangan. Memasuki tahun 2022, capaian kembali meningkat menjadi 101,39%, menunjukkan pemulihan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa

mekanisme pengawasan serta koordinasi dengan pelaku usaha mulai kembali stabil. Pada tahun 2023 dan 2024, capaian relatif stabil masing-masing 100,42% dan 100,00%, mencerminkan konsistensi antara target dan realisasi. Stabilitas ini menandakan bahwa proses pengawasan dan penyelesaian rekomendasi telah berjalan secara lebih mapan, dengan keseimbangan antara jumlah inspeksi, kualitas tindak lanjut, serta kapasitas sumber daya yang tersedia.



Gambar 1.9 Tren Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Capaian indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan ini menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020–2024, namun secara konsisten berada di atas target sejak 2020. Pada tahun 2020, capaian tercatat sangat tinggi, yaitu 184,64%, mencerminkan tingginya respons pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi. Capaian ekstrem ini umumnya terjadi karena fokus pengawasan diarahkan pada sarana yang sudah memiliki sistem kepatuhan baik, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan dengan cepat dan tuntas. Memasuki tahun 2021, capaian turun namun tetap tinggi pada 106,33%. Hal ini menggambarkan respons yang tetap cepat dari pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, asosiasi pelaku usaha, maupun pihak industri dalam menindaklanjuti hasil inspeksi, meskipun cakupan sarana yang diawasi mulai lebih beragam. Pada tahun 2022, capaian mengalami penurunan kembali menjadi 101,43%. Penurunan ini dapat dijelaskan oleh meningkatnya jumlah rekomendasi yang membutuhkan tindak lanjut lintas sektor, termasuk temuan dengan tingkat risiko lebih tinggi yang memerlukan proses pembenahan lebih kompleks. Selain itu, proses administrasi dan pelaporan tindak lanjut yang masih belum sepenuhnya terintegrasi secara digital turut mempengaruhi kecepatan penyelesaian. Pada tahun 2023, capaian meningkat kembali menjadi 110,81%, menunjukkan adanya

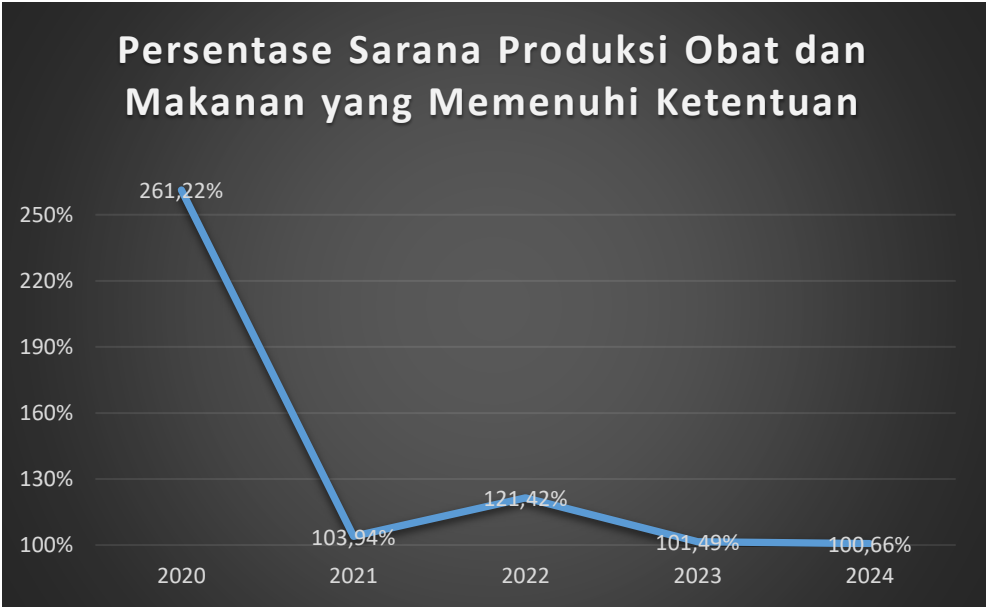
penguatan koordinasi lintas instansi dan perbaikan efektivitas forum komunikasi. Tindak lanjut menjadi lebih cepat berkat peningkatan sinergi antara Balai POM di Bogor, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Pada tahun 2024, capaian kembali naik hingga 116,85%, mencerminkan keberlanjutan mekanisme koordinasi yang semakin sistematis serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap hasil pembinaan dan rekomendasi perbaikan.



Gambar 1.10 Tren Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tren Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu ini menunjukkan pola fluktuatif sepanjang periode 2020–2024, namun secara umum tetap berada dalam kategori baik dan cenderung meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2020, capaian berada pada 62,02%, yang mencerminkan keterlambatan proses penyelesaian sertifikasi, kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi pandemi dan penyesuaian prosedur kerja sehingga beberapa tahapan administrasi maupun penilaian teknis tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2021, capaian meningkat tajam menjadi 101,17%, menandakan perbaikan signifikan dalam proses penyelesaian sertifikasi. Efisiensi pelayanan kembali pulih, baik melalui perbaikan alur kerja maupun adaptasi terhadap mekanisme administrasi digital yang mulai diperkuat selama masa pandemi. Namun, pada 2022 capaian kembali menurun ke 80,11%. Penurunan ini selaras dengan adanya transisi menuju sistem sertifikasi berbasis risiko yang diberlakukan secara nasional. Proses validasi data dan penyesuaian terhadap kriteria baru menyebabkan beberapa permohonan memerlukan waktu lebih panjang untuk diverifikasi secara menyeluruh. Dinamika ini wajar terjadi pada masa penerapan kebijakan baru yang membutuhkan penyesuaian teknis dan administratif. Memasuki tahun 2023, capaian meningkat kembali menjadi 102,68%, menunjukkan bahwa petugas sertifikasi telah semakin mampu

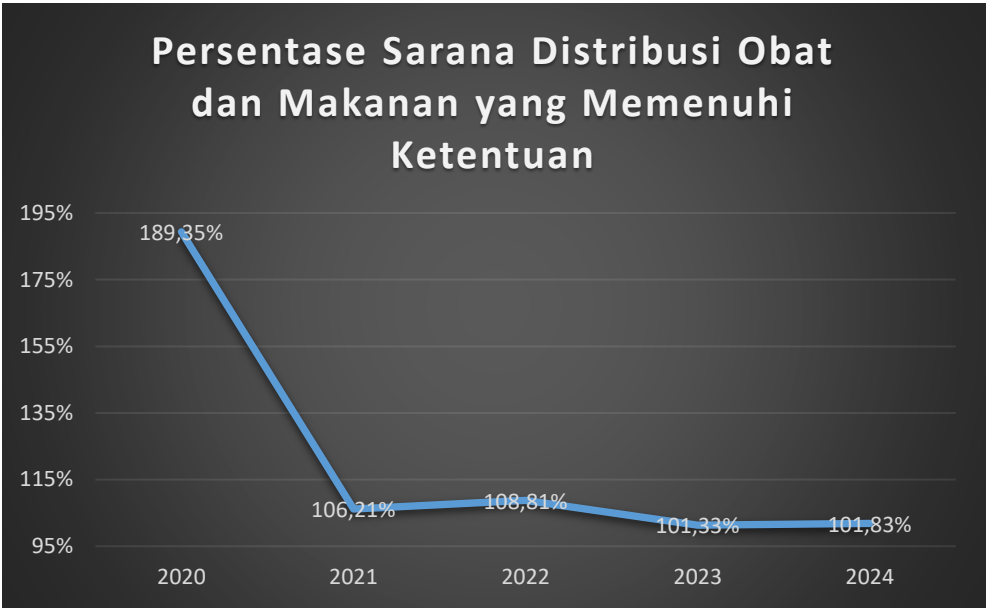
beradaptasi dengan sistem baru dan alur kerja yang diperbarui. Sistem digital yang lebih matang dan peningkatan kualitas koordinasi internal turut mempercepat proses evaluasi dan pengambilan keputusan sertifikasi. Pada 2024, capaian kembali menunjukkan peningkatan signifikan hingga 106,38%, yang mencerminkan semakin efisiennya proses penilaian sertifikasi. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan kompetensi petugas, pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi SOP, serta pemetaan risiko yang lebih tepat terhadap jenis sarana yang diajukan untuk sertifikasi.



Gambar 1.11 Tren Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Capaian indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan menunjukkan pola fluktuatif selama 2020–2024, namun secara umum menggambarkan peningkatan kepatuhan sarana produksi serta efektivitas pengawasan yang dilakukan. Pada tahun 2020, capaian tercatat sangat tinggi, yaitu 261,22%, yang disebabkan oleh fokus pengawasan pada sarana yang telah memiliki standar mutu baik, serta adanya peningkatan aktivitas pembinaan dalam masa pemulihan pasca awal pandemi. Tingginya capaian ini mencerminkan konsentrasi pemeriksaan pada sarana yang relatif sudah memenuhi ketentuan sehingga kontribusi terhadap persentase sangat besar. Memasuki tahun 2021, capaian berada pada tingkat tinggi sebesar 103,94%. Kenaikan proporsional ini mencerminkan keberhasilan kegiatan pembinaan terhadap sarana prioritas yang pada tahun sebelumnya masih ditemukan tidak memenuhi ketentuan. Evaluasi tindak lanjut yang lebih ketat serta pemantauan berulang membantu meningkatkan angka kepatuhan. Pada tahun 2022, capaian kembali meningkat signifikan menjadi 121,42%. Peningkatan ini berkaitan dengan pelaksanaan program intensifikasi pemeriksaan terhadap sarana berisiko tinggi, serta pendampingan pasca-audit yang mendorong percepatan pemenuhan standar produksi. Dampak

intervensi ini terlihat dari bertambahnya jumlah sarana yang mampu memenuhi ketentuan setelah mendapatkan pembinaan teknis dan korektif. Pada tahun 2023 dan 2024, capaian tetap berada di atas 100%, yaitu 101,49% dan 100,66%. Stabilitas capaian ini menggambarkan bahwa kepatuhan pelaku usaha sudah semakin mapan. Sarana yang sebelumnya memiliki temuan ketidakpatuhan mampu mempertahankan perbaikan yang telah dilaksanakan. Konsistensi ini juga menunjukkan bahwa penerapan pendekatan pengawasan berbasis risiko oleh Balai POM Bogor berjalan efektif dalam mendorong standar produksi yang berkelanjutan.

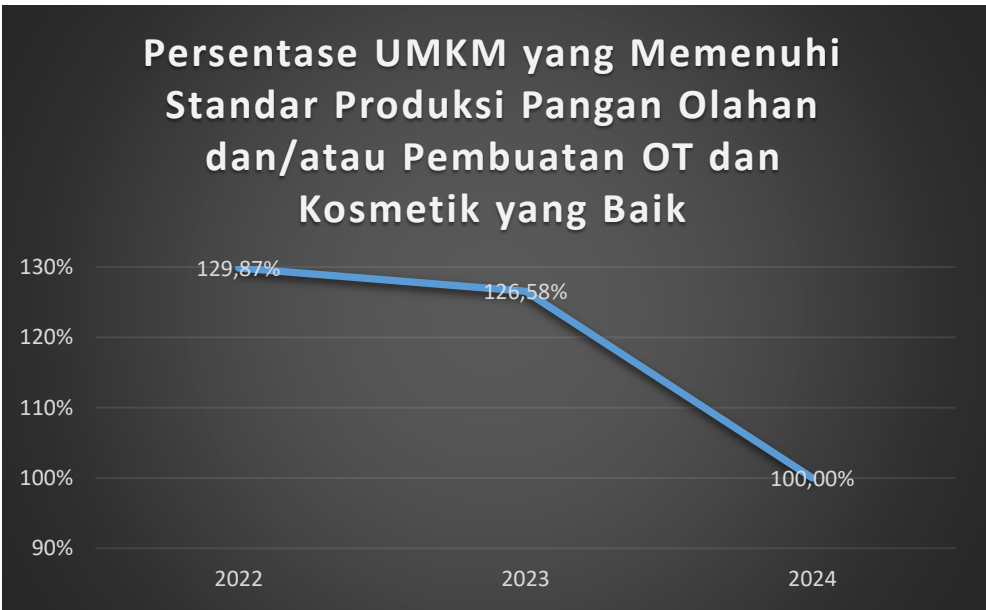


Gambar 1.12 Tren Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Capaian indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan menunjukkan pola menurun namun stabil sepanjang 2020–2024, dengan konsistensi baik sejak 2021 karena selalu berada di atas 100%. Pada tahun 2020, capaian tercatat sangat tinggi, yaitu 189,35%, yang menggambarkan konsentrasi pemeriksaan pada sarana distribusi dengan tingkat kepatuhan tinggi misalnya distributor besar dengan sistem mutu yang sudah mapan. Kondisi ini menyebabkan proporsi sarana yang memenuhi ketentuan jauh melampaui target yang ditetapkan. Memasuki tahun 2021, capaian berada pada 106,21%, menandakan keberhasilan dalam pembinaan rutin serta tindak lanjut temuan pada sarana distribusi yang sebelumnya belum memenuhi standar. Perbaikan administrasi dan dokumentasi distribusi turut mempercepat pemenuhan ketentuan oleh pelaku usaha. Pada tahun 2022, capaian meningkat kembali menjadi 108,81%, merupakan capaian tertinggi dalam periode 2021–2024. Peningkatan ini didukung oleh kegiatan pembinaan yang lebih intensif pada distributor berisiko tinggi, serta penerapan sistem pelacakan distribusi secara digital yang membantu memantau arus produk lebih akurat. Implementasi sistem ini

mendorong sarana untuk memperbaiki prosedur penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran produk agar sesuai dengan ketentuan Cara Distribusi Obat dan Makanan yang Baik (CDOB/CPPOB). Pada 2023 dan 2024, capaian tetap stabil di angka 101,33% dan 101,83%, mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku distribusi sudah cukup mapan dan terpelihara dengan baik. Stabilitas ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem dokumentasi elektronik serta sinergi antara Balai POM dan pelaku usaha mampu menciptakan pola pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Indikator Indeks Pelayanan Publik mulai diukur pada 2024 dengan capaian 3,89 dari target 3,55 atau senilai 109,58%, berada pada kategori “Sangat Baik”. Nilai ini menunjukkan peningkatan nyata dalam kualitas pelayanan publik Balai POM di Bogor. Aspek yang paling meningkat adalah kecepatan layanan, kejelasan informasi, dan kemudahan akses. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan penerapan sistem pelayanan digital dan survei kepuasan masyarakat berbasis elektronik. Responden menilai pelayanan Balai POM semakin cepat, transparan, dan ramah pengguna. Hasil ini juga menjadi cerminan dari komitmen satuan kerja terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik.



Gambar 1.13 Tren Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

Capaian indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik menunjukkan kinerja luar biasa selama 2022–2024, seluruhnya berada di atas 100%. Tahun 2022 capaian mencapai sekitar 129,87% berkat keberhasilan program pembinaan UMKM pangan olahan dan obat tradisional. Tahun 2023 dan 2024 capaian stabil, menunjukkan

kesinambungan program dan peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap penerapan standar produksi yang baik dengan capaian 126,58% dan 100%. Tren positif ini mencerminkan peran strategis Balai POM dalam membina pelaku usaha kecil agar mampu memenuhi standar keamanan dan mutu produk. Melalui kegiatan bimbingan teknis, pendampingan lapangan, dan kerja sama lintas sektor, tingkat kepatuhan UMKM di wilayah kerja Balai POM Bogor meningkat signifikan.

Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi, Makanan, dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan mulai diukur pada 2024 dengan capaian 104,92%, mencerminkan tingginya partisipasi Balai POM Bogor dalam kegiatan lintas program nasional seperti pengawasan obat tradisional, program pangan aman, dan pemberdayaan masyarakat sadar obat dan makanan. Kinerja ini menunjukkan efektivitas kerja sama lintas sektor antara Balai POM, pemerintah daerah, dan lembaga kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk yang dikonsumsi. Partisipasi aktif UPT dalam kegiatan lintas program menjadi indikator bahwa peran pengawasan obat dan makanan semakin terintegrasi dalam sistem kesehatan daerah.

Secara umum, kinerja SK2 menunjukkan tren peningkatan capaian yang konsisten dan stabil selama 2020–2024. Seluruh indikator berada di atas target, menandakan efektivitas pelaksanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Tahun 2022 menjadi momentum peningkatan terbesar berkat pemulihan kegiatan lapangan pasca-pandemi dan penerapan sistem pengawasan berbasis digital. Keberhasilan Balai POM Bogor dalam SK2 didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain koordinasi lintas sektor yang kuat, implementasi sistem pelaporan dan sertifikasi elektronik, serta pembinaan pelaku usaha yang berkelanjutan. Konsistensi capaian di atas 100% juga mencerminkan tingginya komitmen satuan kerja terhadap pelayanan publik yang transparan dan profesional. Secara keseluruhan, SK2 dapat dinilai sangat berhasil dalam mencapai tujuan strategisnya. Pengawasan sarana dan peningkatan pelayanan publik di Balai POM Bogor tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas obat dan makanan.

3. SK3: Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja UPT

Sasaran kegiatan ini berfokus pada peningkatan efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha, agar semakin memahami pentingnya keamanan, mutu, dan legalitas obat dan makanan. Keberhasilan pelaksanaan KIE menjadi kunci utama

peningkatan kesadaran publik dan pencegahan pelanggaran terhadap ketentuan peredaran produk obat dan makanan.



Gambar 1.14 Tren Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Capaian indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan menunjukkan tren fluktuatif namun tetap berada pada kategori sangat baik, dengan keseluruhan capaian sejak 2021 konsisten di atas 100%. Pada tahun 2020, capaian berada pada tingkat sangat tinggi, yaitu 130,16%. Kondisi ini mencerminkan tingginya kebutuhan informasi masyarakat terkait obat dan makanan selama masa awal pandemi, yang mendorong intensitas kegiatan KIE baik melalui media sosial, webinar, maupun kampanye masif di tingkat daerah. Pada tahun 2021, efektivitas KIE tercatat 100,89%, menandakan bahwa pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi berjalan efektif meskipun masih dibatasi oleh protokol pandemi. Adaptasi terhadap pola sosialisasi daring berjalan baik, sehingga pesan keamanan pangan dan obat tetap tersampaikan secara luas. Pada tahun 2022, capaian meningkat menjadi 102,43%, mencerminkan penguatan kegiatan KIE melalui kembalinya pendekatan tatap muka serta perluasan sasaran ke sekolah, komunitas, pasar, dan kelompok rentan. Tahun ini menandai fase pemulihan penuh aktivitas edukasi masyarakat pasca-pandemi, dimana sinergi lintas sektor semakin kuat. Pada tahun 2023, capaian sedikit menurun menjadi 100,60%, dan kembali turun tipis menjadi 100,10% pada 2024. Penurunan kecil ini tidak menunjukkan adanya penurunan efektivitas KIE, melainkan perubahan strategi dari fokus pada kuantitas kegiatan menjadi fokus pada kualitas pesan dan dampak edukasi. KIE mulai diarahkan secara lebih spesifik pada segmen masyarakat yang berisiko tinggi, seperti pelaku usaha kecil, ibu rumah tangga, dan lingkungan sekolah, serta memperkuat jejaring komunitas pangan aman.

Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman merupakan pengukuran baru yang mulai diterapkan pada tahun 2024 dengan capaian 100%, menandakan seluruh target sekolah (6 sekolah) di Kota Bogor yang direncanakan telah berhasil memenuhi kriteria PJAS Aman. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen Balai POM Bogor dalam mendukung keamanan pangan di lingkungan sekolah melalui edukasi, pendampingan, dan verifikasi lapangan terhadap kantin serta pemasok bahan pangan. Capaian sempurna ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor antara Balai POM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pihak sekolah berjalan efektif. Selain itu, program ini telah berhasil membangun kesadaran siswa, guru, dan pengelola kantin mengenai pentingnya penyediaan jajanan sehat dan bebas bahan berbahaya. Sebagai indikator baru, capaian 100% menjadi pijakan kuat untuk pengembangan model pembinaan PJAS di tahun-tahun berikutnya, baik dalam jumlah sekolah maupun peningkatan keberlanjutan praktik pangan aman di lingkungan pendidikan.

Indikator Jumlah Desa Pangan Aman juga baru diukur pada tahun 2024 dengan capaian 100% dari target 1 (satu) desa/kelurahan di Kota Bogor, yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan seluruh target pembinaan desa dalam program Desa Pangan Aman. Program ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat desa agar mampu melakukan pengawasan pangan secara mandiri melalui peningkatan kapasitas kader desa, penguatan kelembagaan pangan, dan pembentukan jejaring komunikasi pangan aman di tingkat lokal. Capaian 100% menggambarkan keberhasilan Balai POM Bogor dalam melaksanakan pembinaan sesuai sasaran dan menumbuhkan komitmen pemerintah desa terhadap penyediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Pencapaian ini menjadi dasar penting bagi perluasan model Desa Pangan Aman di tahun-tahun mendatang, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis keamanan pangan.

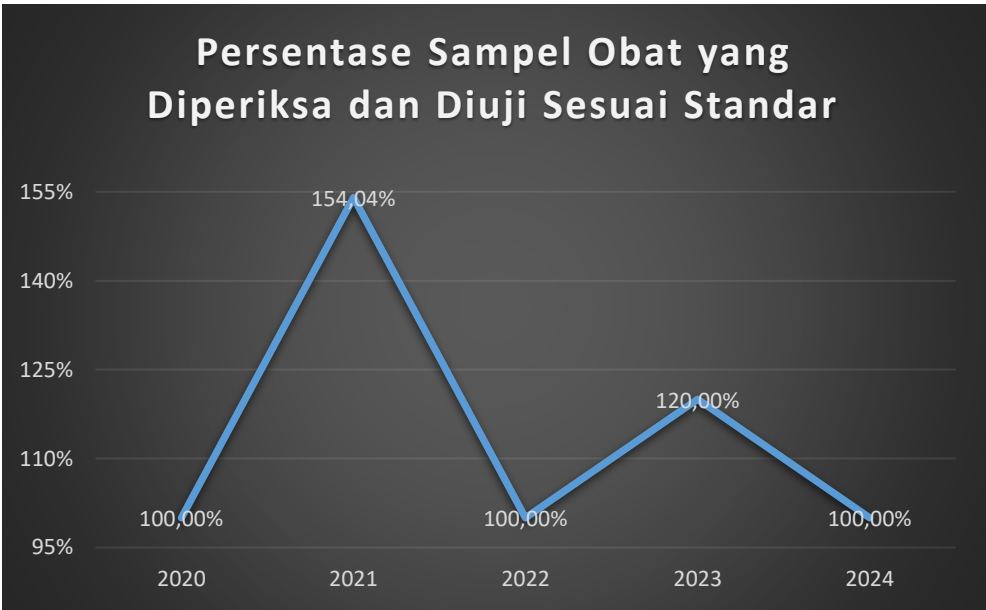
Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas mulai diimplementasikan pada tahun 2024 dengan capaian 100% dari target 1 (satu) pasar di Kota Bogor, menandakan seluruh pasar yang menjadi target pembinaan telah memenuhi kriteria Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran pedagang, pengelola pasar, dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan melalui penerapan praktik higienis, pengawasan bahan pangan, dan penyediaan sarana pendukung seperti tempat penyimpanan serta fasilitas sanitasi. Capaian 100% menunjukkan efektivitas pelaksanaan pembinaan yang dilakukan secara kolaboratif dengan Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan pengelola pasar. Selain itu, keberhasilan ini mencerminkan adopsi positif prinsip keamanan pangan oleh pelaku usaha mikro di sektor informal, yang merupakan salah satu tantangan

utama pengawasan pangan di tingkat komunitas. Dengan capaian penuh pada tahun pertama pengukuran, indikator ini menunjukkan potensi besar bagi keberlanjutan program dan perluasan replikasi ke wilayah pasar lain di tahun-tahun mendatang.

Seluruh indikator dalam SK3 menunjukkan tren peningkatan yang kuat dan konsisten sepanjang periode 2020–2024. Efektivitas KIE meningkat seiring dengan berkembangnya model komunikasi berbasis kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital. Capaian tinggi pada indikator PJAS Aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman berbasis komunitas menandakan bahwa kegiatan edukasi telah bertransformasi menjadi gerakan masyarakat yang berkelanjutan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Balai POM Bogor berhasil memperkuat peran masyarakat sebagai subjek utama dalam pengawasan obat dan makanan. Dengan demikian, SK3 dapat dinilai sangat berhasil dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi dan edukasi publik sebagai fondasi kesadaran keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM Bogor.

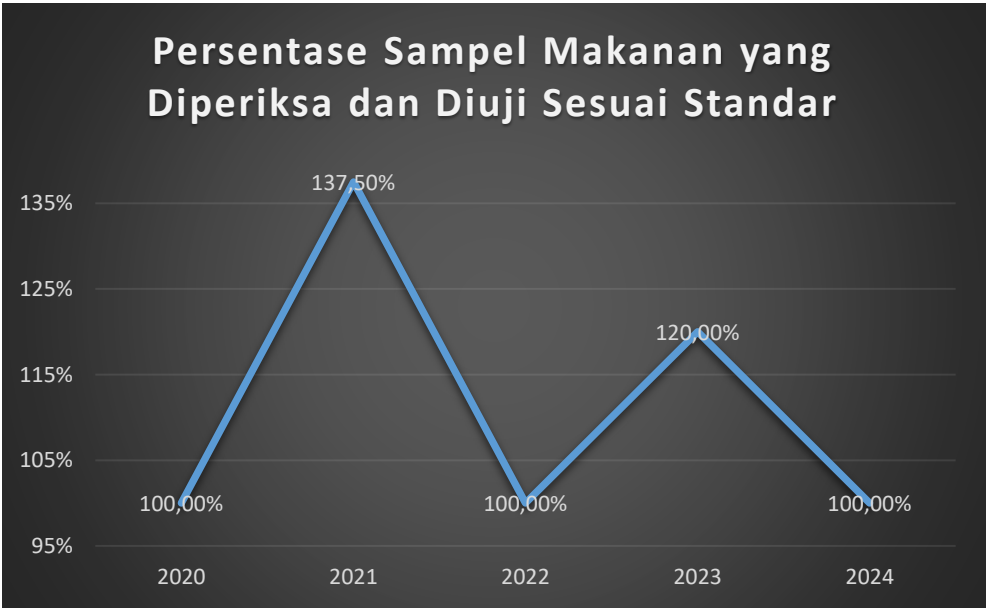
4. SK4: Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja UPT

Sasaran kegiatan ini berfokus pada peningkatan efektivitas kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja. Pemeriksaan dan pengujian merupakan tahapan penting dalam menjamin keamanan, mutu, serta kesesuaian produk dengan standar yang berlaku. Efektivitas pengujian juga mencerminkan kapasitas laboratorium dan kualitas pelaksanaan sistem pengawasan post-market di Balai POM Bogor.



Gambar 1.15 Tren Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa Balai POM di Bogor telah melaksanakan fungsi pengawasan mutu obat secara konsisten dan efektif. Sepanjang periode tersebut, kinerja pemeriksaan dan pengujian obat senantiasa mencapai, bahkan pada beberapa tahun melampaui, target yang telah ditetapkan. Tahun 2021 mencatat capaian sebesar 154,04%, yang menunjukkan adanya peningkatan intensitas pengawasan serta optimalisasi kapasitas laboratorium dalam menangani jumlah sampel yang lebih tinggi dari rencana kerja. Capaian ini mencerminkan komitmen Balai POM di Bogor dalam memastikan bahwa obat yang beredar memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat. Pada tahun 2022, capaian stabil pada angka 100%, menandakan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian berjalan sesuai target serta menunjukkan keberlangsungan proses operasional yang efektif. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 120%, menggambarkan peningkatan efisiensi sistem pengujian serta kemampuan unit kerja dalam merespons dinamika kebutuhan pengawasan di lapangan. Selanjutnya, capaian tahun 2024 kembali mencapai 100%, menegaskan kemampuan Balai POM di Bogor dalam menjaga konsistensi pelaksanaan tugas pengawasan sesuai standar yang berlaku. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Balai POM di Bogor mampu mempertahankan kualitas layanan pengujian obat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan obat nasional. Keberhasilan capaian indikator ini menjadi dasar penting bagi penguatan strategi pengawasan obat ke depan, termasuk peningkatan sinergi dengan pemangku kepentingan, optimalisasi sumber daya laboratorium, serta penegakan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar dan regulasi obat yang berlaku.



Gambar 1.16 Tren Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa Balai POM di Bogor telah menjalankan fungsi pengawasan keamanan pangan secara konsisten dan efektif. Selama periode ini, seluruh capaian indikator berada pada atau di atas target yang ditetapkan, menggambarkan komitmen kuat dalam memastikan pangan yang beredar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi masyarakat. Pada tahun 2021, capaian mencapai 137,50%, yang menunjukkan intensifikasi kegiatan pengawasan serta peningkatan jumlah sampel yang diuji melebihi rencana. Pengujian mencakup berbagai kelompok pangan seperti pangan olahan, pangan kemasan, dan pangan lokal yang diperoleh dari pasar tradisional, retail modern, hingga sarana produksi. Capaian tersebut mencerminkan optimalisasi sumber daya laboratorium dan responsivitas terhadap dinamika risiko pangan di wilayah pengawasan. Tahun 2022, capaian stabil pada angka 100%, menunjukkan pelaksanaan pengujian yang berjalan sesuai rencana dan ketercapaian target secara penuh. Pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan capaian menjadi 120%, yang menegaskan kemampuan Balai POM di Bogor dalam meningkatkan volume dan efektivitas pengujian, serta memperkuat pengawasan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan. Selanjutnya pada tahun 2024, capaian kembali berada pada angka 100%, yang menunjukkan konsistensi pelaksanaan tugas pengujian sampel pangan sesuai standar dan target. Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan keberhasilan Balai POM di Bogor dalam menjaga keamanan pangan, memperkuat kualitas pengawasan berbasis risiko, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan keamanan pangan. Capaian ini menjadi dasar strategis dalam penguatan program pengawasan pangan pada periode selanjutnya, termasuk peningkatan kapasitas laboratorium, penguatan jejaring pengawasan lintas sektor, serta perluasan program literasi keamanan pangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Selama periode 2020–2024, kinerja SK4 menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan konsisten, mencerminkan efektivitas sistem pengujian dan pemeriksaan produk yang dijalankan oleh Balai POM Bogor. Baik pengujian obat maupun makanan menunjukkan capaian di atas target nasional, menandakan kemampuan laboratorium dalam menjamin mutu hasil uji dan mendukung pengawasan berbasis risiko. Peningkatan capaian setiap tahun juga menunjukkan keberhasilan perbaikan manajemen mutu laboratorium dan kolaborasi lintas seksi dalam proses sampling hingga pelaporan hasil. Dengan demikian, SK4 dapat disimpulkan berhasil secara konsisten dalam memastikan efektivitas pemeriksaan dan pengujian sebagai bagian penting dari sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM Bogor.

5. SK5: Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja UPT

Sasaran kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan efektivitas tindakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Kinerja SK5 menggambarkan kemampuan Balai POM Bogor dalam mendeteksi, menindak, dan menuntaskan kasus pelanggaran yang berpotensi membahayakan masyarakat, serta peran koordinasi lintas sektor dalam proses penegakan hukum.



Gambar 1.17 Tren Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

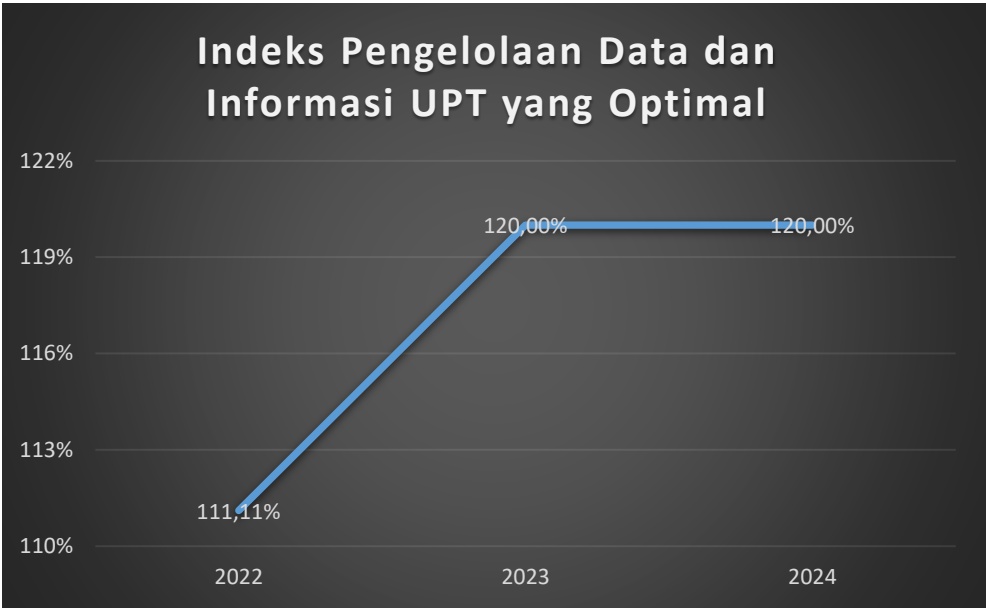
Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan selama periode 2020–2024 menunjukkan kinerja Balai POM di Bogor dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap peredaran produk obat dan makanan yang melanggar ketentuan. Secara umum, capaian indikator memperlihatkan tren peningkatan yang kuat setelah menghadapi penurunan pada tahun 2022, serta menunjukkan kemampuan lembaga dalam merespon dinamika kasus di lapangan. Pada tahun 2021, capaian berada pada angka 95,54%, mendekati target yang ditetapkan, menandakan bahwa sebagian besar kasus pelanggaran berhasil ditindak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan capaian menjadi 75,18%. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya kompleksitas modus kejahatan, keterbatasan kapasitas sumber daya, serta perlunya adaptasi strategi penindakan terhadap pola pelanggaran yang semakin beragam dan terorganisir. Memasuki tahun 2023, capaian meningkat signifikan menjadi 106,58%, melampaui target. Peningkatan ini menggambarkan penguatan efektivitas penindakan melalui kolaborasi lintas sektor, optimalisasi intelijen pengawasan, serta peningkatan kemampuan analisis kasus oleh tim penindakan. Proses penegakan hukum di tahun

tersebut menunjukkan percepatan dalam penanganan kasus dan peningkatan hasil operasi. Pada tahun 2024, capaian kembali meningkat secara signifikan menjadi 121,95%, merupakan capaian tertinggi selama periode Renstra. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan dalam melaksanakan seluruh target penindakan bahkan melebihi rencana, didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, intensifikasi operasi lapangan, serta peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, capaian indikator ini memperlihatkan efektivitas Balai POM di Bogor dalam menjaga masyarakat dari risiko obat dan makanan ilegal, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, serta memperkuat sistem penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Pencapaian tersebut menjadi landasan strategis bagi pengembangan pendekatan penindakan yang semakin adaptif, berbasis risiko, dan terintegrasi pada periode perencanaan berikutnya.

6. SK6: Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran kegiatan ini mencerminkan upaya Balai POM di Bogor dalam memperkuat sistem laboratorium pengujian serta pengelolaan data dan informasi pengawasan. Keberhasilan dalam sasaran ini menjadi fondasi penting bagi efektivitas pengawasan secara keseluruhan, karena memastikan hasil uji yang valid, terintegrasi, dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based monitoring*).

Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP merupakan IKU baru yang mulai diukur tahun 2024, dengan target 40% dan realisasi 54,04% (120%, kategori Sangat Baik). Capaian ini menunjukkan bahwa Balai POM di Bogor telah berhasil melampaui target awal, terutama karena penguatan infrastruktur laboratorium dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Realisasi tinggi tersebut ditopang oleh pengadaan berbagai peralatan laboratorium modern (seperti Biosafety Cabinet, Autoclave, Inkubator, Fume Hood, dan Dehumidifier) serta personel penguji yang memiliki latar belakang kompetensi dari Balai Besar dan Pusat Pengujian BPOM. Keberhasilan ini juga sejalan dengan arah kebijakan BPOM dalam penguatan laboratorium daerah menuju standar GLP (Good Laboratory Practice). Meskipun merupakan indikator baru, capaian tahun 2024 menunjukkan kesiapan Balai POM di Bogor dalam menjadi model laboratorium pengujian regional yang kompeten dan berstandar tinggi, mendukung akurasi hasil pengawasan obat dan makanan, serta memperkuat peran laboratorium sebagai instrumen perlindungan konsumen.



Gambar 1.18 Tren Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal menunjukkan peningkatan konsistensi Balai POM di Bogor dalam mengimplementasikan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola data pengawasan obat dan makanan. Tahun 2022 capaian indeks mencapai 2,5 dari target 2,25 (111,11%), menunjukkan kinerja yang sangat baik meskipun masih dalam tahap adaptasi terhadap pemanfaatan dashboard dan email korporat. Tahun 2023 meningkat dengan capaian 3 dari target 2,5 (120%), mencerminkan optimalisasi penggunaan sistem informasi seperti Dashboard BOC dan e-mail korporat yang rutin diakses oleh seluruh pegawai. Tahun 2024 capaian tetap stabil pada nilai 3 dari target 3 (120%), menunjukkan kemantapan dan konsistensi kinerja digitalisasi data di lingkungan Balai POM di Bogor. Tren ini memperlihatkan bahwa penguatan pengelolaan data dan informasi telah mencapai fase optimal, dengan efisiensi penggunaan sumber daya yang tinggi dan kepatuhan terhadap sistem informasi BPOM. Keberhasilan ini menjadi modal penting dalam mendukung transparansi, percepatan pelaporan, serta integrasi data pengawasan antarunit untuk mendukung kebijakan berbasis bukti di masa mendatang.

Secara keseluruhan, capaian kedua indikator tersebut mencerminkan transformasi kelembagaan Balai POM di Bogor menuju organisasi yang lebih modern, transparan, dan berorientasi hasil. Peningkatan kualitas laboratorium, kematangan sistem data, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat menjadi fondasi penting dalam memperkuat efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Bogor dan Depok.

7. SK7: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap keamanan serta mutu obat dan makanan yang dikonsumsi. Kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci dalam menciptakan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan, sekaligus mendukung efektivitas regulasi di lapangan.

Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu juga merupakan IKU baru di tahun 2024, dengan target 88,67 dan realisasi 87,39 (98,56%, kategori Cukup) . Indeks ini diukur berdasarkan tiga komponen pembentuk kesadaran, yaitu pengetahuan (92,85), sikap (90,46), dan perilaku (80,37). Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan sudah tinggi, perubahan perilaku nyata masih menjadi tantangan utama. Upaya peningkatan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi dan edukasi, seperti layanan informasi daring dan luring, media sosial (Instagram, Facebook, Twitter/X), media cetak (banner, leaflet), media elektronik (RRI), media luar ruang (videotron), dan media digital (SMS blast). Capaian ini menandai awal yang positif bagi Balai POM di Bogor dalam membangun kesadaran publik. Meski belum sepenuhnya mencapai target, keberhasilan hampir 99% menunjukkan efektivitas strategi komunikasi dan kolaborasi lintas sektor. Ke depan, tantangan terletak pada bagaimana memperkuat aspek perubahan perilaku masyarakat agar pemahaman tentang keamanan dan mutu produk benar-benar terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

8. SK8: Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembinaan kepada pelaku usaha serta masyarakat, khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Tingkat kepuasan stakeholder menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas pelayanan, transparansi, dan keandalan Balai POM Bogor dalam melaksanakan tugasnya.

Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2024 mencapai 104,99%, menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dan melampaui target kinerja. Capaian ini mencerminkan efektivitas peran Balai POM di Bogor dalam memberikan layanan pembinaan yang responsif, edukatif, dan solutif kepada pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan coaching clinic, sosialisasi regulasi, pendampingan izin edar, dan pembinaan UMKM

pangan telah berjalan optimal dan tepat sasaran. Tingginya kepuasan pelaku usaha juga menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan yang dilakukan tidak hanya menekankan aspek pengawasan, tetapi juga pemberdayaan, sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa strategi pembinaan yang humanis dan kolaboratif mampu memperkuat sinergi antara regulator dan pelaku usaha dalam mewujudkan produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2024 mencapai 102,76%, menandakan bahwa masyarakat menilai kinerja Balai POM di Bogor sangat baik dan melebihi ekspektasi. Hasil ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Bogor. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan, penindakan, serta edukasi publik yang dilakukan telah memberikan dampak nyata bagi perlindungan masyarakat. Masyarakat merasakan manfaat langsung dari keberadaan Balai POM melalui peningkatan keamanan produk di pasaran, kemudahan akses informasi, serta cepatnya respon terhadap laporan pengaduan. Peningkatan kepuasan ini juga menandakan keberhasilan lembaga dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik yang baik, yang pada akhirnya memperkuat citra positif BPOM sebagai institusi pengawas yang profesional dan berintegritas.

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT tahun 2024 sebesar 102,06% menunjukkan bahwa kualitas layanan publik Balai POM di Bogor telah melampaui standar kinerja yang ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan peningkatan kualitas pelayanan baik dari aspek ketepatan waktu, kejelasan prosedur, kemudahan akses, maupun keramahan dan profesionalitas petugas. Hasil ini mencerminkan penerapan prinsip service excellence serta nilai-nilai BerAKHLAK dan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) dalam budaya pelayanan. Tingginya kepuasan pengguna layanan menunjukkan efektivitas penerapan inovasi pelayanan publik berbasis digital dan sistem antrean online yang lebih efisien. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa Balai POM di Bogor telah menginternalisasi prinsip pelayanan prima yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan arah reformasi birokrasi dan penguatan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

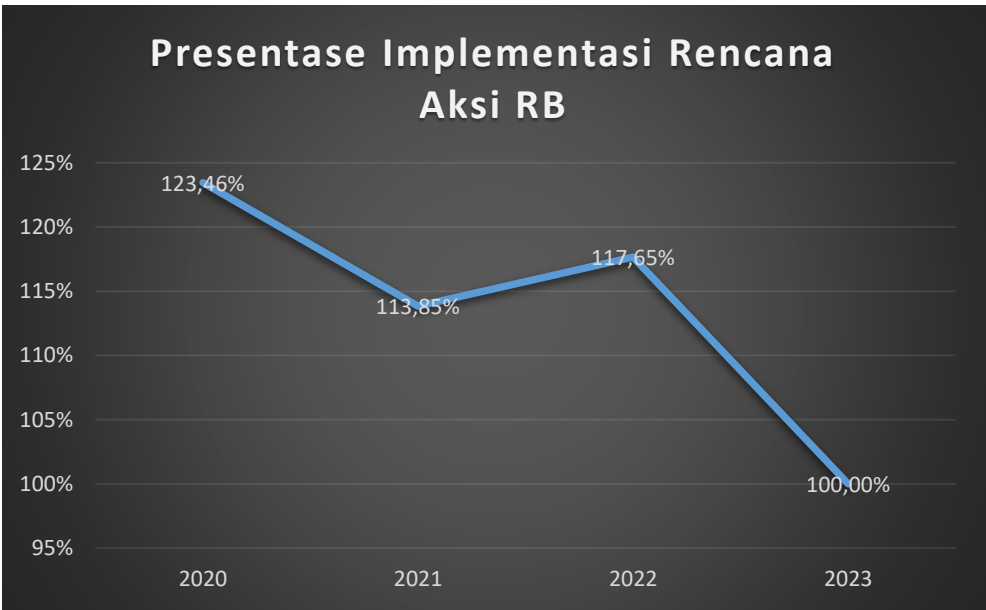
Secara keseluruhan, capaian ketiga indikator kepuasan di tahun 2024 menunjukkan kinerja pelayanan publik dan pengawasan yang sangat baik serta berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Indeks kepuasan pelaku usaha, masyarakat atas kinerja pengawasan, dan masyarakat terhadap layanan publik seluruhnya melampaui 100%,

menandakan bahwa Balai POM di Bogor berhasil menjaga dan meningkatkan kualitas interaksi, transparansi, serta responsivitas dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Capaian ini memperlihatkan bahwa pendekatan kolaboratif antara BPOM dan pelaku usaha telah membangun iklim usaha yang lebih patuh dan produktif, sementara dari sisi masyarakat, meningkatnya kepuasan menunjukkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap peran Balai POM sebagai pelindung kesehatan masyarakat. Kombinasi antara pengawasan yang tegas dan pelayanan yang humanis menghasilkan keseimbangan antara pengendalian risiko dan pemberdayaan publik. Dengan hasil ini, Balai POM di Bogor berhasil memperkuat posisinya sebagai institusi pengawas yang kredibel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan prima, serta menjadi contoh implementasi nyata reformasi birokrasi yang berfokus pada kepuasan dan perlindungan masyarakat.

Balai POM di Bogor juga memiliki beberapa inovasi yang bertujuan untuk mempercepat pemberian layanan publik, seperti GROW BPOM, PUNTEN MANGGA, POLITE BPOM, dll. Inovasi ini juga diikuti sertakan dalam Lomba KOIN (Kompetisi Inovasi) BPOM.

9. SK9: Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan UPT yang Optimal

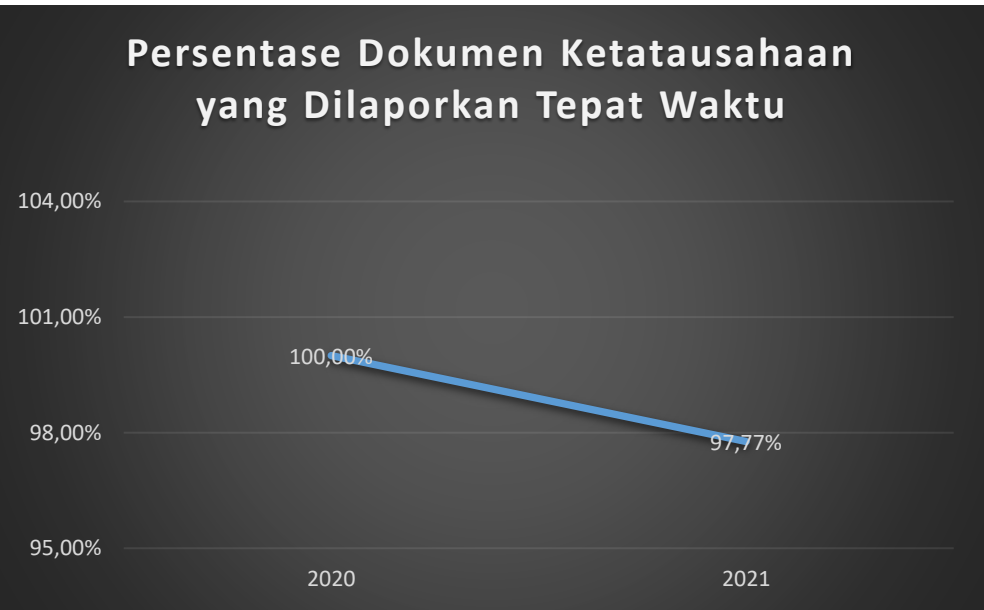
Sasaran kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui sasaran ini, Balai POM Bogor berupaya memastikan seluruh aspek manajerial, administratif, dan akuntabilitas kinerja berjalan sesuai prinsip reformasi birokrasi dan *good governance*.



Gambar 1.19 Tren Persentase Implementasi Rencana Aksi RB

Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) pada Balai POM di Bogor selama periode 2020–2023 menunjukkan tingkat komitmen organisasi dalam melaksanakan program-program penguatan

tata kelola, peningkatan kualitas layanan, serta pembangunan budaya kerja yang berintegritas. Pada tahun 2020, capaian implementasi mencapai 123,46%, yang mencerminkan antusiasme tinggi dalam pelaksanaan rencana aksi RB. Nilai ini menunjukkan bahwa berbagai inisiatif reformasi, seperti penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan akuntabilitas internal, tidak hanya terlaksana sesuai target tetapi juga melampaui rencana kerja yang ditetapkan. Tahun 2021 mencatat capaian 113,85%. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini tetap menunjukkan pelaksanaan RB yang sangat baik. Penurunan relatif tersebut lebih disebabkan oleh penyesuaian rencana aksi dan prioritas program yang lebih terfokus, namun pelaksanaan tetap berjalan secara efektif, termasuk dalam penerapan budaya kerja BerAKHLAK dan penguatan pengawasan internal. Pada tahun 2022, capaian meningkat kembali menjadi 117,65%, mencerminkan konsistensi organisasi dalam memperkuat reformasi birokrasi. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh keberhasilan implementasi inovasi pelayanan, percepatan digitalisasi proses bisnis, serta penguatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi reformasi. Sementara itu, pada tahun 2023, capaian berada pada tingkat 100,00%, yang menandakan bahwa seluruh rencana aksi telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai target. Meskipun tidak melampaui target seperti tahun-tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan bahwa program RB tetap berjalan sesuai perencanaan dan organisasi mampu menjaga stabilitas implementasi reformasi secara berkelanjutan.



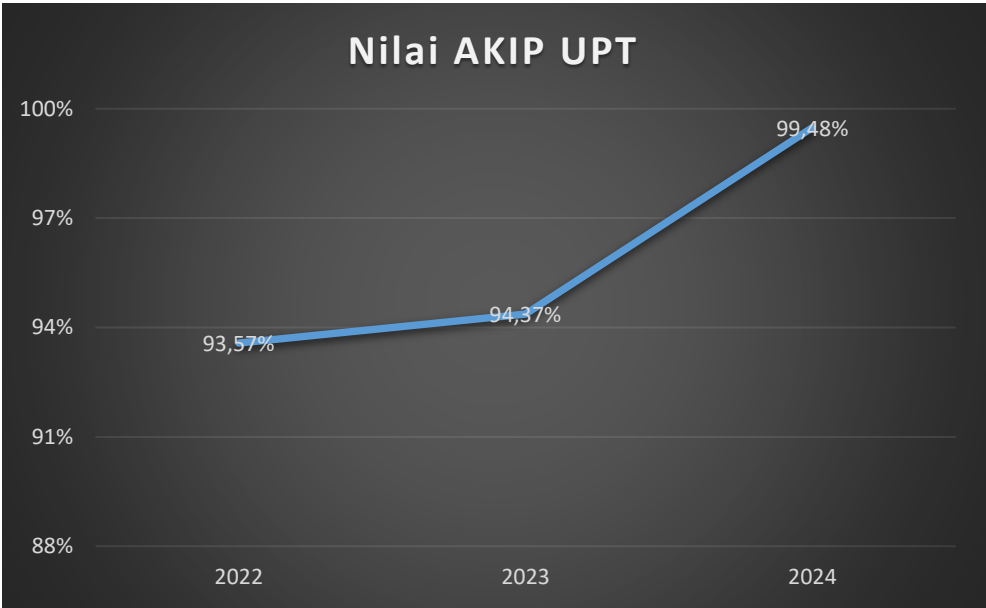
Gambar 1.20 Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu

Indikator Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu merupakan ukuran kepatuhan satuan kerja dalam menyampaikan

dokumen administrasi sesuai batas waktu yang ditetapkan. Pada tahun 2020, capaian mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh dokumen ketatausahaan termasuk surat-menyurat, laporan rutin, dokumen keuangan, serta arsip kelembagaan telah diselesaikan dan dilaporkan tepat waktu. Capaian ini mencerminkan tata kelola administrasi yang tertib serta efektivitas sistem pengendalian internal pada periode awal Renstra. Pada tahun 2021, capaian indikator sedikit menurun menjadi 97,77%, namun tetap berada dalam kategori sangat baik. Penurunan tipis ini menunjukkan adanya beberapa dokumen yang mengalami keterlambatan minor, tetapi tidak berdampak signifikan terhadap keseluruhan kinerja tata kelola. Secara umum, capaian dua tahun tersebut menunjukkan bahwa Balai POM di Bogor telah menerapkan ketatausahaan yang tertib, akuntabel, dan sesuai prosedur.

Indikator Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi yang Disusun Tepat Waktu diukur pada tahun 2021 dengan capaian 100%, menunjukkan seluruh dokumen perjanjian kinerja dan laporan capaian rencana aksi telah disusun dan disampaikan sesuai jadwal yang ditetapkan. Capaian ini menandakan disiplin perencanaan dan pelaporan yang baik, serta kesiapan Balai POM di Bogor dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Ketepatan waktu penyusunan dokumen juga mencerminkan koordinasi yang efektif antarunit kerja, serta penerapan siklus manajemen kinerja yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Walaupun data hanya tersedia untuk satu tahun, capaian penuh ini menunjukkan pondasi tata kelola kinerja yang kuat untuk mendukung peningkatan nilai AKIP di tahun-tahun berikutnya.

Capaian Indeks RB UPT pada tahun 2024 sebesar 101,33% menunjukkan hasil evaluasi yang sangat baik dan melampaui target. Nilai ini mencerminkan keberhasilan Balai POM di Bogor dalam menjaga konsistensi pelaksanaan RB melalui penerapan delapan area perubahan secara menyeluruh, meliputi peningkatan tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Keberhasilan ini juga didukung oleh implementasi Zona Integritas menuju WBK yang terencana dengan baik, serta inovasi-inovasi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Capaian ini mengindikasikan bahwa Balai POM di Bogor telah mencapai tahap reformasi berkelanjutan, di mana seluruh pegawai telah berperan aktif dalam menciptakan budaya kerja yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi hasil.



Gambar 1.21 Tren Nilai AKIP UPT

Nilai AKIP UPT menunjukkan peningkatan kinerja yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, capaian sebesar 93,57% menunjukkan penerapan awal sistem akuntabilitas kinerja yang baik, disusul peningkatan pada 2023 menjadi 94,37%, dan kembali naik signifikan pada 2024 mencapai 99,48%. Tren positif ini menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam penyusunan perencanaan kinerja, pelaksanaan program, hingga pelaporan hasil secara terukur dan transparan. Peningkatan nilai AKIP juga menggambarkan efektivitas penerapan SAKIP yang menekankan keterkaitan antara anggaran dan hasil (*value for money*), serta kemampuan organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal maupun eksternal. Dengan capaian hampir menyentuh 100%, Balai POM di Bogor menunjukkan akuntabilitas kinerja yang sangat baik dan semakin efisien dalam mencapai hasil sesuai tujuan strategis.

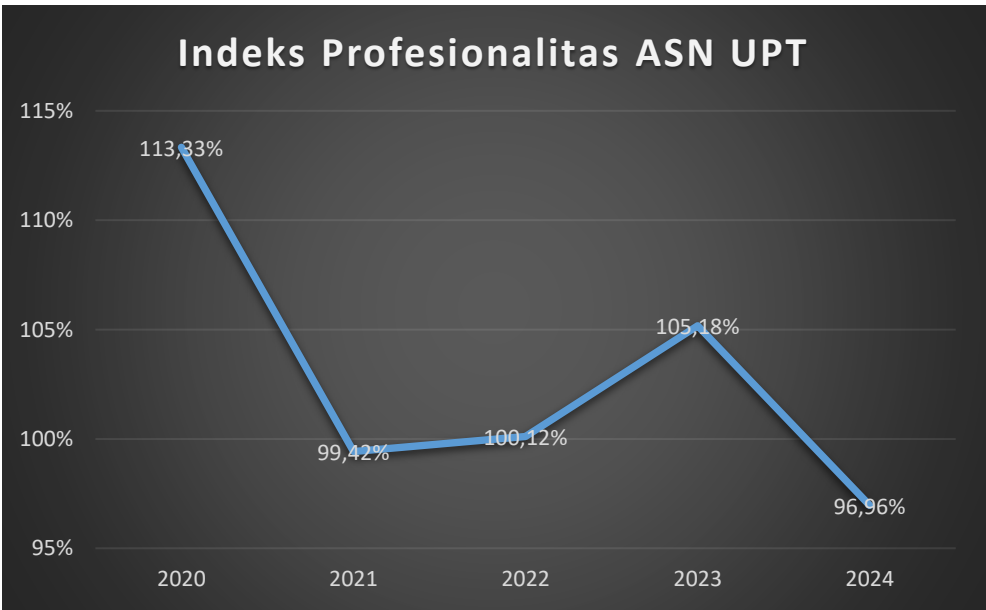
Capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan tahun 2024 sebesar 112,52% menunjukkan pelaksanaan tata kelola arsip yang sangat baik, tertib, dan melebihi target. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Balai POM di Bogor dalam menerapkan prinsip tertib arsip sesuai ketentuan ANRI, termasuk pengelolaan arsip aktif, inaktif, dan permanen secara sistematis. Pencapaian ini juga didukung oleh implementasi sistem kearsipan digital dan pemeliharaan sarana prasarana penyimpanan arsip yang memadai. Hasil ini menunjukkan bahwa Balai POM di Bogor telah mampu membangun sistem pengelolaan arsip yang efisien, aman, dan berkelanjutan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

Capaian keenam indikator tata kelola dan reformasi birokrasi menunjukkan bahwa Balai POM di Bogor telah berhasil melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* dan Reformasi Birokrasi Berkelanjutan

secara konsisten selama periode 2021–2024. Tren capaian menunjukkan hasil yang stabil di atas 100% untuk sebagian besar indikator, menandakan komitmen kuat terhadap peningkatan tata kelola, kedisiplinan administrasi, dan akuntabilitas kinerja. Keberhasilan implementasi Rencana Aksi RB dan peningkatan nilai AKIP menjadi bukti bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja telah berjalan efektif dan terintegrasi. Di sisi lain, capaian tinggi pada pengelolaan kearsipan dan ketatausahaan menunjukkan bahwa aspek tertib administrasi dan dokumentasi juga telah tertanam kuat dalam budaya organisasi. Seluruh hasil ini memperkuat posisi Balai POM di Bogor sebagai unit pelaksana teknis yang unggul dalam manajemen perubahan, transparansi, serta profesionalisme pelayanan publik, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendukung penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

10. SK10: Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal

Sasaran kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Balai POM Bogor agar memiliki kompetensi, profesionalitas, dan integritas tinggi dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan. SDM yang berkinerja optimal menjadi penggerak utama tercapainya seluruh sasaran strategis organisasi.



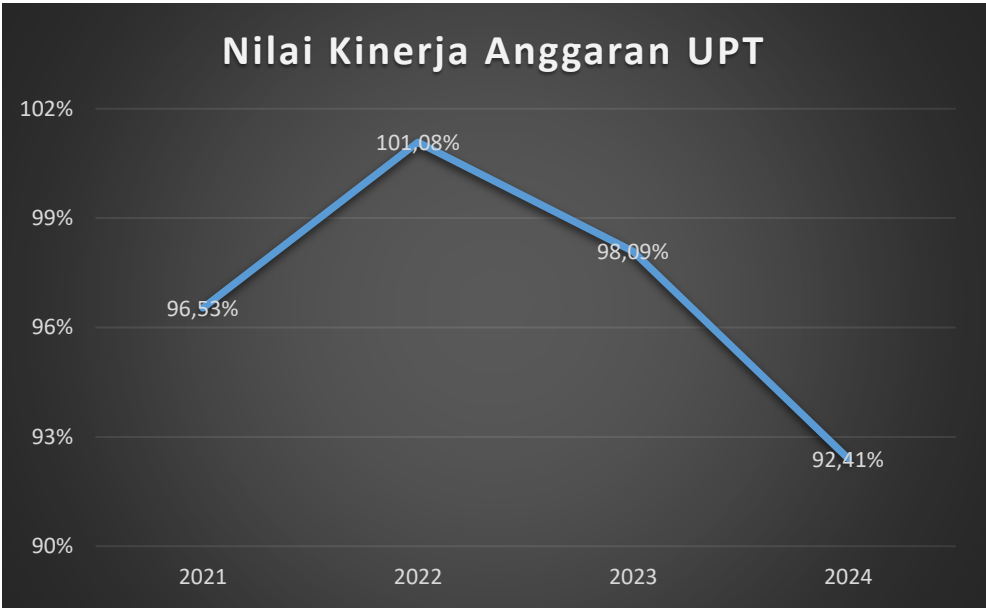
Gambar 1.22 Tren Indeks Profesionalitas ASN UPT

Capaian Indeks Profesionalitas ASN UPT pada Balai POM di Bogor selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang menggambarkan kemampuan organisasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas aparatur. Pada tahun 2020, capaian indeks mencapai 113,33%, menjadi nilai tertinggi dalam periode evaluasi. Angka ini mencerminkan kondisi ASN yang sangat profesional, dengan kinerja yang melampaui target serta penerapan sistem merit dan manajemen SDM yang efektif. Pencapaian

tersebut juga menunjukkan kuatnya budaya integritas dan kepatuhan ASN terhadap standar kompetensi serta kode etik profesi. Memasuki tahun 2021, indeks menurun menjadi 99,42%, yang mengindikasikan adanya penyesuaian organisasi terhadap perubahan kebijakan, pola kerja, maupun penataan kembali distribusi SDM pascapandemi. Meskipun mengalami penurunan, nilai ini masih berada dalam kategori baik dan mencerminkan komitmen ASN untuk tetap menjalankan tugas sesuai standar kompetensi jabatan. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan menjadi 100,12%, menunjukkan bahwa profesionalitas ASN kembali menguat seiring dengan pelaksanaan berbagai program pengembangan kompetensi, seperti pelatihan teknis, manajerial, serta peningkatan kualitas penilaian kinerja berbasis aplikasi e-Kinerja. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan upaya penguatan kapasitas aparatur secara lebih sistematis. Kinerja ASN kembali meningkat pada tahun 2023, mencapai 105,18%, yang menjadi salah satu pencapaian terbaik dalam lima tahun terakhir. Nilai ini menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek integritas, etos kerja, inovasi, dan orientasi hasil, didukung oleh implementasi budaya kerja BerAKHLAK, pelaksanaan coaching dan mentoring, serta penerapan reward and punishment yang konsisten. Namun, pada tahun 2024, nilai indeks menurun menjadi 96,96%. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh dinamika formasi jabatan, mutasi pegawai, perubahan beban kerja, maupun adaptasi terhadap sistem kerja baru. Kendati demikian, capaian tersebut tetap berada pada kategori baik dan menunjukkan bahwa ASN masih mampu mempertahankan dasar-dasar profesionalitas, seperti disiplin, integritas, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

11. SK11: Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Sasaran kegiatan ini berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, barang, dan jasa di lingkungan Balai POM Bogor. Keberhasilan sasaran ini menjadi indikator penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, serta sesuai dengan prinsip *value for money*.



Gambar 1.23 Tren Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai POM di Bogor selama periode 2021–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi, namun tetap berada dalam kategori baik. Pada tahun 2021, capaian sebesar 96,53% menandakan pelaksanaan anggaran telah efektif meskipun belum seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai perencanaan akibat penyesuaian anggaran di masa pandemi. Tahun 2022 capaian meningkat menjadi 101,08%, menunjukkan pengelolaan anggaran yang semakin optimal dengan pelaksanaan kegiatan yang lebih tepat waktu dan efisien. Namun, pada tahun 2023 capaian sedikit menurun menjadi 98,09%, dan kembali turun di tahun 2024 menjadi 92,41%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam efisiensi pelaksanaan anggaran terutama pada kegiatan fisik dan dukungan operasional. Meskipun demikian, capaian ini masih menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran di atas standar minimal, menandakan bahwa perencanaan dan penyerapan dana tetap terkontrol dengan baik. Secara umum, tren empat tahun menunjukkan bahwa Balai POM di Bogor telah menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, namun perlu penguatan dalam budget performance management untuk menjaga konsistensi capaian optimal setiap tahun.



Gambar 1.24 Tren Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT pada Balai POM di Bogor selama periode 2020–2021 menunjukkan kemampuan satuan kerja dalam mengelola anggaran secara efektif dan berorientasi pada hasil. Pada tahun 2020, tingkat efisiensi mencapai 113,64%, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Capaian ini mencerminkan penerapan prinsip efisiensi melalui penghematan biaya operasional, optimalisasi pengadaan barang dan jasa, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Pada tahun 2021, tingkat efisiensi meningkat menjadi 118,14%, menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang semakin baik. Kenaikan ini menggambarkan adanya peningkatan kapasitas perencanaan, pengendalian biaya, dan pelaksanaan kegiatan prioritas yang lebih tepat sasaran. Efisiensi di atas 100% pada dua tahun berturut-turut menandakan bahwa Balai POM di Bogor telah menerapkan prinsip value for money secara konsisten melalui strategi penghematan, pemantauan realisasi anggaran yang kuat, serta perbaikan proses bisnis yang mendukung produktivitas. Meskipun data hanya tersedia hingga tahun 2021, tren positif tersebut menunjukkan bahwa organisasi mampu menjaga keseimbangan antara penggunaan sumber daya dan capaian kinerja, sehingga anggaran negara dapat memberikan manfaat optimal terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan obat dan makanan.

Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa diukur pada tahun 2024 dengan capaian 102,31%, menunjukkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Balai POM di Bogor telah berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Capaian ini menggambarkan bahwa seluruh tahapan pengadaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan telah mengikuti ketentuan peraturan perundangan dan menggunakan aplikasi SPSE serta *e-purchasing* secara

konsisten. Pencapaian di atas target juga menunjukkan adanya peningkatan koordinasi antara pejabat pengadaan dan PPK, serta efektivitas sistem monitoring dan evaluasi pengadaan. Keberhasilan ini memperkuat kepercayaan terhadap integritas proses pengadaan dan mencerminkan komitmen Balai POM di Bogor dalam mendorong tata kelola pengadaan yang bersih dan bebas dari penyimpangan.

Capaian Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2024 sebesar 100,84%, menandakan bahwa pengelolaan aset negara telah dilakukan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Nilai ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan pengelolaan BMN mulai dari pencatatan, inventarisasi, pemeliharaan, hingga pelaporan telah dilaksanakan dengan tertib dan akurat. Capaian di atas 100% mencerminkan efektivitas penerapan sistem informasi SIMAK-BMN dan penataan ruang penyimpanan aset yang lebih tertib. Pengelolaan aset yang baik juga menunjukkan komitmen Balai POM di Bogor terhadap prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan barang milik negara untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik. Ke depan, penguatan sistem pemantauan aset berbasis digital perlu terus dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan BMN yang transparan dan efisien.

Pada tahun 2024, capaian Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri mencapai 138,83%, menunjukkan komitmen kuat Balai POM di Bogor dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri nasional dan penerapan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI). Capaian yang jauh melampaui target ini menunjukkan bahwa mayoritas kebutuhan barang dan jasa telah dipenuhi melalui produk dalam negeri, baik melalui e-katalog lokal maupun penyedia nasional. Pencapaian ini tidak hanya memperkuat keberpihakan terhadap UMKM dan industri lokal, tetapi juga menunjukkan kontribusi nyata Balai POM di Bogor dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui pengadaan yang berorientasi domestik. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen organisasi dalam menjalankan kebijakan belanja pemerintah yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, capaian lima indikator bidang keuangan dan pengelolaan aset menunjukkan bahwa Balai POM di Bogor telah melaksanakan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara konsisten. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada nilai kinerja anggaran di tahun 2024, hasil keseluruhan masih menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran dengan efisiensi tinggi. Nilai pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan BMN, serta penggunaan produk dalam negeri yang melebihi 100% menggambarkan tata kelola sumber daya yang tertib, hemat, dan berpihak pada kebijakan nasional.

Capaian ini menunjukkan bahwa Balai POM di Bogor tidak hanya fokus pada realisasi anggaran, tetapi juga pada kualitas pelaksanaannya, dengan menekankan value for money dan kepatuhan terhadap prinsip pengadaan yang bersih. Dengan pencapaian tersebut, Balai POM di Bogor telah memperkuat posisinya sebagai instansi yang mampu mengelola sumber daya negara secara efisien, mendukung pembangunan ekonomi nasional, serta menjaga akuntabilitas keuangan publik yang berorientasi pada hasil.

1.1.2 Aspirasi Stakeholder

Masukan pemangku kepentingan yang diperoleh melalui forum konsultasi publik, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta hasil survei pelayanan publik seperti IKM, IPP, dan SKM, menjadi dasar penting dalam perumusan arah kebijakan dan strategi Balai POM di Bogor dalam Renstra Tahun 2025–2029. Secara umum, pemangku kepentingan menilai bahwa kualitas pelayanan Balai POM di Bogor telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan penguatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

1. Penyempurnaan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan.

Hasil analisis SKM menunjukkan bahwa tiga aspek yang memperoleh nilai relatif lebih rendah adalah:

- a. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur,
- b. Persyaratan Layanan, serta
- c. Waktu Penyelesaian.

Masyarakat menyampaikan perlunya penyederhanaan prosedur, kejelasan persyaratan layanan, serta peningkatan konsistensi waktu penyelesaian, termasuk terkait evaluasi berkas pendaftaran produk. Selain itu, terdapat harapan untuk peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi, keterlacakan, dan efisiensi proses layanan.

2. Penguatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.

Pemangku kepentingan menilai bahwa sarana dan prasarana pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, antara lain area layanan informasi, fasilitas toilet, plang identitas kantor, dan koneksi internet. Kondisi ini menegaskan perlunya pemenuhan standar pelayanan publik melalui penyediaan fasilitas yang lebih memadai untuk memastikan kenyamanan dan aksesibilitas pengguna layanan.

3. Peningkatan Responsivitas dan Kapasitas Layanan Digital.

Masukan yang diterima melalui kanal pengaduan dan survei menunjukkan bahwa responsivitas layanan, khususnya melalui media

digital seperti WhatsApp, media sosial, dan sistem konsultasi daring, masih perlu ditingkatkan. Pengguna layanan juga menyampaikan kebutuhan akan jam layanan yang lebih fleksibel serta dukungan sistem teknologi informasi yang lebih andal. Penambahan jumlah petugas pada layanan yang memiliki beban kerja tinggi, seperti Sertifikasi, menjadi salah satu rekomendasi utama guna meningkatkan efektivitas pelayanan.

4. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Petugas.

Masyarakat dan pemangku kepentingan menyampaikan perlunya peningkatan kompetensi komunikasi, interaktivitas, dan kemampuan pendampingan teknis petugas layanan. Temuan internal juga menunjukkan bahwa sebagian petugas belum memperoleh pelatihan layanan prima (service excellent) dan belum tersedia mekanisme penghargaan bagi petugas yang berprestasi. Kondisi ini menjadi dasar perlunya penguatan kualitas SDM pelayanan sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik.

5. Penguatan Layanan Pengujian dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Pelaku usaha, UMKM, dan aparat penegak hukum memberikan masukan terkait kebutuhan peningkatan kapasitas layanan laboratorium, meliputi penambahan parameter uji prioritas, percepatan waktu penyelesaian pengujian, serta peningkatan transparansi melalui sistem pemantauan digital. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat pendampingan teknis CPPOB/CPPB, layanan pra-registrasi yang lebih terstruktur, serta penyederhanaan informasi regulasi dan peningkatan kegiatan edukasi publik.

6. Peningkatan Komunikasi Risiko dan Edukasi Publik.

Masyarakat, komunitas pendidikan, dan pelaku UMKM menyampaikan perlunya perluasan kegiatan komunikasi risiko dan edukasi publik melalui pemanfaatan media digital, pendekatan komunitas, serta penyajian materi yang lebih sederhana dan mudah diterapkan. Hal ini penting dalam rangka memperkuat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai keamanan obat dan makanan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Bogor memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan di wilayah kerja yang meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. Wilayah ini merupakan kawasan dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi, termasuk pusat pendidikan, industri pangan olahan, serta perdagangan obat dan kosmetik. Kondisi tersebut menuntut

pengawasan yang lebih intensif, adaptif, dan berorientasi pada inovasi pengawasan berbasis risiko serta digitalisasi sistem informasi.

Perubahan status kelembagaan dari Loka POM di Kabupaten Bogor menjadi Balai POM di Bogor melalui Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam penguatan fungsi kelembagaan. Transformasi ini tidak hanya memperluas kewenangan dan kapasitas pengawasan, tetapi juga menuntut peningkatan sumber daya manusia, sarana-prasarana laboratorium, serta tata kelola organisasi agar sejalan dengan visi Badan POM dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional dan daya saing bangsa sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029.

Dalam kurun 2021–2024, capaian kinerja Balai POM di Bogor menunjukkan tren positif di berbagai indikator utama, antara lain:

1. Indeks Profesionalitas ASN UPT yang konsisten tinggi (rata-rata di atas 100%), mencerminkan komitmen dan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang meningkat, menandakan adanya kemajuan dalam integrasi data perencanaan dan pelaporan berbasis aplikasi.
3. Peningkatan capaian akreditasi laboratorium dan penerapan ISO/IEC 17025, yang memperkuat kredibilitas hasil pengujian obat dan makanan.
4. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu, yang mulai terukur sejak 2024, menggambarkan efektivitas edukasi publik melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

Namun demikian, hasil evaluasi terhadap periode RENSTRA 2020–2024 juga menunjukkan bahwa keberhasilan ini diiringi dengan berbagai tantangan baru. Kompleksitas pengawasan meningkat seiring pesatnya pertumbuhan UMKM pangan olahan dan obat tradisional, perdagangan daring, serta inovasi produk farmasi yang terus berkembang. Di sisi lain, keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengawas, keterlambatan integrasi sistem manajemen risiko dan kinerja, serta belum optimalnya sistem tanggap darurat pengawasan (*early warning system*) masih menjadi faktor penghambat efektivitas pelaksanaan tugas.

Analisis terhadap lingkungan strategis juga memperlihatkan bahwa Balai POM di Bogor beroperasi dalam konteks perubahan besar baik di tingkat nasional maupun global. Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik) “Percepatan Penurunan Stunting” dan “Peningkatan Investasi”, transformasi digital, serta peningkatan tuntutan akuntabilitas publik menuntut Balai POM di Bogor untuk beradaptasi dengan pendekatan pengawasan yang inovatif, responsif, dan kolaboratif.

Di tingkat internal, penguatan tata kelola dilakukan melalui implementasi Quality Management System (ISO 9001:2015), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Penerapan sistem mutu ini berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan prosedural, efisiensi proses bisnis, dan transparansi pelayanan publik. Di sisi lain, penguatan kompetensi SDM, peningkatan kapasitas laboratorium, dan optimalisasi pemanfaatan data hasil pengujian menjadi prioritas strategis untuk mendukung pengawasan berbasis bukti (*evidence-based supervision*).

Sementara itu, dari aspek eksternal, terdapat peluang besar untuk memperluas dampak pengawasan melalui sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media (*pentahelix collaboration*). Keberadaan banyak UMKM di wilayah Bogor dan Depok membuka ruang bagi Balai POM untuk memperkuat perannya dalam pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) serta pendampingan sertifikasi produk. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan pasca-pandemi menjadi peluang dalam memperluas gerakan keamanan pangan dan obat tradisional aman.

Namun, Balai POM di Bogor juga menghadapi ancaman eksternal seperti perubahan iklim yang dapat memengaruhi keamanan bahan pangan, penyalahgunaan bahan kimia dan obat ilegal melalui platform digital, serta tantangan keamanan data dan siber seiring meningkatnya penggunaan sistem informasi daring.

Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan dan strategi jangka menengah 2025–2029, diperlukan pemetaan menyeluruh terhadap faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman). Pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) menjadi instrumen penting untuk memahami posisi strategis Balai POM di Bogor dalam mendukung tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam misi “melindungi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien berbasis risiko.”

1.2.1 Analisis Kekuatan (Strengths)

Kekuatan utama Balai POM di Bogor terletak pada penguatan kelembagaan, komitmen terhadap mutu dan akuntabilitas, serta integrasi dalam sistem nasional pengawasan obat dan makanan. Kekuatan ini menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks di era digital dan globalisasi.

1. Penguatan Kelembagaan melalui Transformasi Organisasi.

Perubahan status kelembagaan dari Loka POM di Kabupaten Bogor menjadi Balai POM di Bogor berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 menandai peningkatan signifikan dalam kapasitas,

kewenangan, dan jangkauan pengawasan. Transformasi ini bukan hanya administratif, tetapi juga strategis yang memungkinkan Balai POM di Bogor untuk memiliki peran yang lebih luas dalam penegakan hukum, pembinaan pelaku usaha, serta pemberdayaan masyarakat. Peningkatan status ini juga diikuti dengan perluasan struktur organisasi yang mencakup bidang penindakan, laboratorium, pelayanan publik, dan administrasi umum, yang memungkinkan pembagian peran lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan hulu-hilir. Dalam konteks RPJMN 2025–2029, keberadaan kelembagaan yang lebih kuat ini menjadi modal utama dalam mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat dan Program Ketahanan Pangan Nasional.

2. Implementasi Sistem Manajemen Mutu dan Akreditasi Laboratorium.

Balai POM di Bogor telah menerapkan Quality Management System (ISO 9001:2015) sebagai bagian dari sistem mutu nasional Badan POM. Penerapan standar ini menunjukkan komitmen Balai terhadap pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan transparan. Di sisi lain, penerapan ISO/IEC 17025 pada laboratorium pengujian menegaskan kompetensi teknis dan keandalan hasil uji, yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap produk hasil pengawasan. Keberadaan laboratorium terakreditasi menjadikan Balai POM di Bogor mampu mendukung pengujian obat, pangan olahan, kosmetik, dan obat tradisional secara cepat dan akurat, serta memberikan dukungan ilmiah pada proses penegakan hukum (*law enforcement*). Akreditasi juga memperkuat posisi Balai POM sebagai rujukan teknis bagi pemerintah daerah dan pelaku industri di wilayah Bogor dan Depok.

3. SDM Profesional dan Berorientasi Reformasi Birokrasi.

Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Bogor menunjukkan capaian yang konsisten tinggi dalam tiga tahun terakhir (rata-rata >100%). Hal ini mencerminkan tingkat disiplin, integritas, dan kompetensi pegawai yang tinggi. Dari sisi kualifikasi, komposisi tingkat pendidikan pegawai menunjukkan bahwa sebagian besar ASN telah memiliki pendidikan Diploma dan Sarjana, dengan distribusi jenjang pendidikan sebagai berikut: D3 (9,5%), S1/D4 (52,4%), dan S2 (38,1%). Salah satu personil Balai POM di Bogor atas nama Alvian Dumingan mendapatkan penghargaan dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia tanggal 12 Agustus 2024 terkait Wisudawan Program Studi Magister Ilmu Kefarmasian (S2) dengan IPK Terbaik: 3,89 (Cumlaude) pada Pra Wisuda Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Pengembangan SDM diarahkan melalui pelatihan teknis dan fungsional, seperti pelatihan Pengawas Farmasi dan Makanan, PPNS, serta penyuluh keamanan pangan. Beberapa pelatihan yang diikuti antara lain Bimtek Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) Topik Khusus, Workshop Fasilitator Registrasi Pangan Olahan dan Bimtek Pengawasan Fortifikasi Pangan. Selain itu, Balai POM

di Bogor secara aktif mengimplementasikan nilai BerAKHLAK dan Core Values ASN, sehingga menciptakan budaya kerja yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi hasil. Upaya ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yang memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pengawasan obat dan makanan.

4. Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja yang Tinggi.

Sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Balai POM di Bogor menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan data, informasi, dan pelaporan kinerja. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT tercatat meningkat setiap tahun, menandakan perbaikan konsistensi, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyediaan data. Penerapan aplikasi e-Kinerja, dashboard monitoring UPT, dan sistem pelaporan terintegrasi Badan POM memungkinkan penyajian data kinerja yang lebih cepat dan terstandarisasi. Peningkatan kualitas data ini menghasilkan efisiensi pengambilan keputusan, yang terlihat dari percepatan proses analisis capaian, penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi, serta penetapan prioritas kegiatan berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Data kinerja yang akurat dan mudah diakses juga mempermudah pimpinan dalam menetapkan fokus pengawasan, alokasi sumber daya, serta penentuan langkah korektif secara tepat waktu. Transparansi dan akuntabilitas tersebut memperkuat prinsip *good governance* serta menjadi instrumen penting untuk membangun organisasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

5. Komitmen terhadap Pengawasan Berbasis Risiko dan Bukti (*Evidence-Based Supervision*).

Kekuatan berikutnya terletak pada penerapan pendekatan pengawasan berbasis risiko, yang menjadi kebijakan strategis nasional BPOM. Balai POM di Bogor telah melaksanakan pengawasan terintegrasi dengan mempertimbangkan faktor risiko, tren pelanggaran, dan hasil sampling laboratorium. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan sumber daya pengawasan secara lebih efektif, menargetkan sarana dan produk dengan risiko tertinggi terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, hasil pengujian laboratorium yang terakreditasi menjadi dasar ilmiah dalam penyidikan dan penindakan kasus pelanggaran, serta digunakan dalam advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah.

6. Kolaborasi Strategis dengan Pemerintah Daerah dan Pentahelix.

Balai POM di Bogor aktif membangun kemitraan lintas sektor melalui pendekatan kolaborasi pentahelix, yaitu model kerja sama yang melibatkan lima unsur utama: pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Pendekatan ini memungkinkan perluasan

jangkauan pengawasan, peningkatan efektivitas edukasi publik, serta penguatan ekosistem keamanan obat dan makanan secara berkelanjutan. Di wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok, kolaborasi pentahelix telah diwujudkan dalam berbagai bentuk kerja sama nyata. Dengan pemerintah daerah, Balai POM berkolaborasi melalui penyelenggaraan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, integrasi kegiatan Surveilans Keamanan Pangan, serta fasilitasi pendampingan UMKM bersama Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Ketahanan Pangan. Bersama akademisi, Balai POM di Bogor melakukan kolaborasi dengan IPB University, Poltekkes Kemenkes, dan beberapa perguruan tinggi lokal dalam kegiatan riset terapan, pengembangan metode edukasi keamanan pangan, serta magang dan praktikum mahasiswa di laboratorium dan bidang pengawasan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi juga mendukung penyusunan kajian risiko lokal serta peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan seminar dan lokakarya ilmiah. Dalam unsur dunia usaha, Balai POM bekerja sama dengan asosiasi UMKM, pelaku industri kecil menengah, serta pelaku usaha ritel dalam kegiatan sosialisasi regulasi, pendampingan CPPOB/CPPB, serta fasilitasi percepatan perizinan produk. Sementara itu, kerja sama dengan komunitas meliputi pembentukan kader keamanan pangan, kegiatan edukasi berbasis komunitas, serta pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam kampanye “Cek KLIK”. Untuk unsur media, Balai POM di Bogor memanfaatkan media lokal, radio komunitas, dan kanal digital untuk mendukung strategi komunikasi risiko, publikasi hasil pengawasan, serta penyebaran informasi edukatif secara rutin. Kolaborasi pentahelix yang terbangun secara konsisten ini menjadi kekuatan strategis dalam mendukung program nasional “Indonesia Sehat”, memperluas dampak edukasi publik, dan memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi keamanan obat dan makanan di wilayah Bogor dan Depok.

7. Infrastruktur Laboratorium dan Teknologi yang Semakin Lengkap.

Peningkatan kapasitas laboratorium pengujian menjadi salah satu keunggulan utama Balai POM di Bogor. Dukungan sarana seperti alat uji modern, sistem kalibrasi, dan prosedur validasi metode memungkinkan pengujian yang cepat dan tepat. Selain itu, arah pengembangan menuju “*green laboratory*” mendukung efisiensi energi dan pengelolaan limbah laboratorium yang ramah lingkungan. Penerapan konsep *green building* juga sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta memperkuat citra Balai POM sebagai lembaga publik yang berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan.

8. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengawasan Internal.

Balai POM di Bogor telah menerapkan SPIP secara bertahap dalam seluruh aspek manajemen, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Fungsi pengawasan internal melalui inspektorat wilayah dan sistem pengendalian manajemen memperkuat akuntabilitas organisasi dan mencegah potensi KKN. Penerapan *whistle-blowing system*, penanganan gratifikasi, dan manajemen risiko organisasi juga meningkatkan integritas kelembagaan. Langkah ini menjadi kekuatan dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa seluruh proses pengawasan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

9. Komitmen terhadap Inovasi dan Adaptasi Teknologi Digital.

Perubahan paradigma menuju transformasi digital telah dimanfaatkan Balai POM di Bogor melalui pemanfaatan berbagai platform digital dalam pelayanan publik, pengawasan lapangan, dan manajemen data. Pelaporan kegiatan pengawasan telah dilakukan melalui aplikasi digital Badan POM, seperti BPOM Mobile, e-BPOM, Cek BPOM dan e-performance.

10. Citra dan Kepercayaan Publik yang Meningkat.

Kinerja Balai POM di Bogor yang konsisten dalam menjaga keamanan obat dan makanan berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan pengawasan menunjukkan nilai positif, memperlihatkan bahwa pelayanan publik yang diberikan semakin efektif dan dirasakan manfaatnya. Keberhasilan dalam berbagai capaian indikator seperti keberhasilan penindakan pelanggaran dan peningkatan kesadaran masyarakat memperkuat posisi Balai POM di Bogor sebagai lembaga yang kredibel dan terpercaya di wilayahnya.

1.2.2 Analisis Kelemahan (Weaknesses)

Di tengah berbagai capaian positif dan penguatan kelembagaan yang telah dilakukan, Balai POM di Bogor masih menghadapi sejumlah kelemahan internal yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Kelemahan ini mencakup aspek sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, integrasi sistem manajemen, dan kesiapan menghadapi dinamika eksternal. Analisis kelemahan berikut disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang perlu diperbaiki dalam periode perencanaan 2025–2029.

1. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia.

Keterbatasan jumlah SDM merupakan salah satu kelemahan paling signifikan. Sebagai Balai yang baru ditingkatkan statusnya dari Loka POM, jumlah pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, PPNS,

serta tenaga laboratorium belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan intensitas kegiatan yang terus meningkat. Tingginya beban kerja akibat pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi, penindakan pelanggaran, serta pelayanan publik menyebabkan distribusi tugas belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) kebutuhan Balai POM di Bogor sebanyak 56 orang namun baru terpenuhi 42 orang sehingga ada gap 14 orang.

2. Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan Manajemen Risiko dan Kinerja.

Meskipun Balai POM di Bogor telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melakukan reviu kinerja secara berkala, integrasi antara manajemen risiko, Corrective Action and Preventive Action (CAPA), dan manajemen kinerja belum berjalan optimal. Ketiga komponen ini seharusnya saling terhubung dalam satu siklus pengelolaan kinerja organisasi, di mana Manajemen Risiko (Manrisk) berfungsi untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian indikator kinerja, seperti risiko rendahnya kepatuhan pelaku usaha, keterbatasan sarana laboratorium, atau lonjakan kasus pengawasan daring. CAPA merupakan tindak lanjut langsung dari risiko yang telah diidentifikasi. CAPA semestinya merinci langkah korektif dan preventif yang diperlukan untuk menekan atau menghilangkan risiko agar tidak berdampak pada capaian kinerja. Dengan demikian, CAPA harus memiliki target waktu, penanggung jawab, serta output yang terukur. Manajemen Kinerja menjadi tahap evaluatif, di mana efektivitas CAPA terhadap penurunan risiko dilihat melalui capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) atau indikator program pengawasan. Namun di Balai POM di Bogor, hubungan antara ketiga elemen ini belum sepenuhnya terintegrasi. Salah satunya disebabkan oleh belum tersedianya sistem digital yang mampu menghubungkan data risiko, tindak lanjut CAPA, dan capaian kinerja dalam satu platform.) Kelemahan tersebut juga dapat memengaruhi kemampuan organisasi dalam merespons perubahan lingkungan strategis dengan cepat, terutama saat terjadi krisis atau pergeseran kebijakan nasional.

3. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Penunjang Operasional.

Walaupun laboratorium Balai POM di Bogor telah mengimplementasikan ISO/IEC 17025, masih terdapat keterbatasan infrastruktur yang memengaruhi kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian secara komprehensif terhadap seluruh jenis produk yang menjadi lingkup pengawasan. Salah satu penyebab utama adalah bahwa parameter uji yang tersedia masih terbatas akibat ketersediaan peralatan yang belum lengkap atau kapasitasnya belum memadai, sehingga beberapa metode uji untuk bahan aktif obat tertentu, cemaran kimia spesifik, logam berat, atau parameter mikrobiologi lanjutan belum dapat dilakukan.

Keterbatasan reagen, bahan standar, dan referensi pustaka ilmiah juga menentukan luasnya parameter uji yang dapat divalidasi dan diakreditasi.

4. Belum Tersedianya Sistem Tanggap Darurat (*Early Warning System*) Pengawasan.

Kelemahan penting lainnya adalah belum tersedianya *early warning system* atau sentra tanggap darurat yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap peredaran produk berisiko tinggi. Ketiadaan sistem ini menyebabkan proses deteksi dini terhadap produk ilegal, pelanggaran daring, atau insiden keamanan pangan menjadi reaktif ketimbang preventif. Dalam konteks wilayah Bogor dan Depok yang merupakan pusat distribusi besar dan memiliki banyak jalur perdagangan daring, kekosongan ini menjadi tantangan serius. Sistem ini penting untuk mengintegrasikan hasil pengawasan lapangan, data laboratorium, serta laporan masyarakat secara real-time guna mencegah risiko terhadap kesehatan publik.

5. Keterbatasan Dukungan Sumber Daya untuk Pelaksanaan Operasional.

Ketersediaan sumber daya operasional merupakan faktor penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan. Dalam implementasinya, dukungan sumber daya yang ada masih perlu diperkuat agar dapat mengimbangi dinamika pengawasan di wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok yang terus berkembang. Kebutuhan untuk kegiatan operasional lapangan, pembinaan UMKM, peningkatan kompetensi SDM, serta pemeliharaan sarana laboratorium sering kali lebih besar dibandingkan kapasitas sumber daya yang tersedia di tingkat UPT. Kondisi ini membuat Balai POM di Bogor perlu menerapkan strategi prioritas kegiatan berdasarkan tingkat urgensi dan risiko, sehingga beberapa rencana pengembangan inovatif seperti perluasan sistem digital pengawasan, peningkatan parameter laboratorium, serta inisiatif laboratorium hijau (*green lab*) belum dapat diimplementasikan secara optimal. Keterbatasan dukungan ini juga membatasi fleksibilitas organisasi dalam merespons kebutuhan mendesak atau program strategis lintas sektor yang memerlukan tambahan tenaga, peralatan, atau logistik.

6. Ketergantungan terhadap Sistem Pusat dalam Pengelolaan Data dan Aplikasi.

Sebagai bagian dari jaringan nasional, Balai POM di Bogor menggunakan berbagai aplikasi terintegrasi dimana sebagian besar sistem ini dikelola secara terpusat oleh Badan POM dan tidak seluruhnya dapat dimodifikasi di tingkat daerah. Kondisi ini membatasi kemampuan Balai POM untuk melakukan penyesuaian sistem sesuai kebutuhan lokal atau untuk mengintegrasikan data dari sumber eksternal (misalnya laporan

pemerintah daerah atau data UMKM lokal). Ketergantungan ini juga berpotensi menimbulkan hambatan teknis dalam pelaporan atau sinkronisasi data kinerja ketika terjadi pembaruan sistem di tingkat pusat.

7. Kapasitas Komunikasi Publik dan Edukasi yang Masih Terbatas.

Meskipun program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) telah dijalankan, kapasitas komunikasi publik Balai POM di Bogor masih perlu ditingkatkan agar mampu menjangkau masyarakat luas, terutama kelompok risiko tinggi seperti pelaku usaha mikro dan konsumen muda di platform daring. Sebagian besar kegiatan KIE masih mengandalkan metode tatap muka atau media sosial konvensional. Belum sepenuhnya dimanfaatkan influencer lokal, media digital interaktif, atau pendekatan behavioral change communication yang terbukti efektif dalam mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Keterbatasan ini menyebabkan pesan keamanan obat dan makanan belum menjangkau secara optimal kelompok masyarakat di wilayah padat penduduk atau daerah penyangga dengan akses informasi rendah.

8. Masih Diperlukan Penguatan Koordinasi Internal dan Eksternal.

Koordinasi internal antarbidang Balai POM di Bogor terutama antara bidang pengawasan, penindakan, laboratorium, dan administrasi belum sepenuhnya terintegrasi, khususnya terkait sinkronisasi jadwal pengawasan, pertukaran data hasil uji, dan tindak lanjut temuan. Hal ini membuat alur kerja lintas fungsi belum berjalan optimal. Secara eksternal, koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, DKP, pemerintah daerah, kepolisian, serta lembaga pendidikan masih menghadapi tantangan perbedaan prioritas kegiatan dan belum adanya sistem koordinasi digital bersama. Dampaknya terlihat pada pelaksanaan operasi gabungan, pembinaan UMKM, dan program keamanan pangan yang belum sepenuhnya sinkron.

9. Kapasitas Penelitian, Kajian, dan Inovasi Terapan yang Masih Rendah.

Sebagai lembaga teknis, Balai POM di Bogor diharapkan mampu menjadi pusat data dan pengetahuan di bidang pengawasan obat dan makanan. Namun, kegiatan penelitian dan inovasi terapan masih terbatas, baik dari sisi pendanaan, sumber daya, maupun kolaborasi akademik. Sebagian besar pegawai belum memiliki kesempatan untuk terlibat dalam riset kolaboratif dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian di wilayah Bogor dan Depok. Padahal, wilayah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan *scientific evidence* dan inovasi produk aman berbasis bahan alam. Rendahnya kegiatan riset terapan ini menyebabkan peluang untuk menghasilkan inovasi kebijakan lokal atau metode pengawasan baru belum dimanfaatkan secara optimal.

1.2.3 Analisis Peluang (Opportunities)

Balai POM di Bogor beroperasi di tengah lingkungan strategis yang dinamis, dengan perubahan kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan keamanan pangan. Kondisi ini menciptakan berbagai peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan memperluas dampak kelembagaan. Peluang-peluang tersebut meliputi aspek kebijakan nasional, teknologi digital, kolaborasi lintas sektor, serta dinamika sosial ekonomi di wilayah kerja Balai POM di Bogor.

1. Dukungan Kebijakan Nasional terhadap Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan.

Peluang terbesar bagi Balai POM di Bogor adalah dukungan kuat dari pemerintah pusat terhadap penguatan sistem pengawasan obat dan makanan sebagai bagian dari Program Indonesia Sehat dan Transformasi Kesehatan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Badan POM secara kelembagaan menjadi aktor utama dalam misi melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman, tidak bermutu, dan/atau tidak bermanfaat yang diperkuat melalui peningkatan kapasitas UPT di daerah. Kebijakan desentralisasi pengawasan memberikan peluang bagi Balai POM di Bogor untuk memperluas peran dalam pembinaan, pendampingan, dan advokasi kebijakan daerah, khususnya terkait keamanan pangan dan sertifikasi produk IKM. Selain itu, dukungan anggaran sektoral dan kebijakan lintas kementerian terkait transformasi digital, reformasi birokrasi, dan penguatan laboratorium nasional menjadi landasan strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat daerah.

2. Perkembangan Teknologi Digital dalam Pengawasan dan Pelayanan Publik.

Perkembangan teknologi digital di Balai POM di Bogor telah dimanfaatkan dalam berbagai aspek pengawasan maupun pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pengawasan, petugas memanfaatkan *geo-tagging* sebagai standar pendokumentasian sarana. Kanal pelaporan seperti HaloPOM dan media sosial Balai POM di Bogor juga menunjukkan peningkatan pemanfaatan oleh masyarakat, yang ditandai dengan bertambahnya aduan dan permintaan informasi yang masuk secara digital. Dalam pelayanan publik, Balai POM di Bogor aktif menggunakan layanan konsultasi daring (*virtual meeting*, *hotline digital*, dan formulir *online*) untuk mendampingi UMKM, terutama pada konsultasi pra-registrasi. Kegiatan edukasi publik juga diperluas melalui webinar KIE, konten infografis, serta kampanye keamanan pangan via Instagram resmi UPT, yang secara kumulatif berhasil menjangkau ribuan masyarakat di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Depok. Pemanfaatan teknologi ini

memperkuat akurasi data, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan Balai POM di Bogor, sejalan dengan arah transformasi digital dan Data Driven Government.

3. Pertumbuhan UMKM dan Industri Pangan serta Obat Tradisional.

Wilayah Bogor dan Depok dikenal sebagai salah satu sentra pertumbuhan UMKM pangan olahan, kosmetik, dan obat bahan alam (OBA) di Indonesia. Pertumbuhan sektor ini menjadi peluang besar bagi Balai POM di Bogor untuk memperkuat fungsi pembinaan dan fasilitasi sertifikasi produk. Program pembinaan seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan One Village One Product (OVOP) sejalan dengan mandat Badan POM dalam meningkatkan daya saing produk lokal yang aman dan bermutu. Melalui pendampingan keamanan pangan, pelatihan Good Manufacturing Practice (GMP), dan sertifikasi produk, Balai POM di Bogor dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing pelaku usaha kecil. Selain itu, peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi di wilayah Bogor seperti IPB University dan UI akan dapat mendukung riset terapan dan pengembangan inovasi produk berbasis bahan alam yang memenuhi standar keamanan. Jumlah sarana yang diawasi oleh Balai POM di Bogor berjumlah 12.288.

4. Kolaborasi Pentahelix dan Sinergi dengan Pemerintah Daerah.

Pendekatan kolaboratif pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekosistem pengawasan obat dan makanan. Pemerintah daerah di wilayah Bogor dan Depok memiliki program prioritas yang sejalan dengan tugas Balai POM, seperti peningkatan ketahanan pangan, penanggulangan stunting, dan pemberdayaan UMKM. Hal ini membuka ruang sinergi lintas program yang saling mendukung. Balai POM di Bogor dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas jejaring kemitraan, membangun mekanisme koordinasi yang berkesinambungan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan partisipatif (*community-based surveillance*). Selain itu, sinergi dengan media lokal dapat memperkuat strategi komunikasi risiko dan memperluas jangkauan edukasi publik.

5. Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.

Pasca pandemi COVID-19, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan obat dan makanan meningkat secara signifikan. Masyarakat semakin selektif terhadap produk yang dikonsumsi dan lebih terbuka terhadap informasi regulasi dan labelisasi produk. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi Balai POM di Bogor untuk memperkuat

kegiatan edukasi publik berbasis perilaku (*behavioral change communication*) dan kampanye digital. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen, fungsi pengawasan dapat diperluas menjadi *shared responsibility* antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Balai POM dapat mengembangkan program *smart citizen awareness* melalui kampanye “Cek KLIK” (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) yang berfokus pada pembentukan perilaku konsumsi aman di masyarakat perkotaan dan perdesaan. Selama 2023–2024, Balai POM di Bogor melaksanakan lebih dari 40 kegiatan KIE berbasis komunitas dan mengembangkan pola edukasi yang berfokus pada pembentukan kebiasaan aman, antara lain: Gerakan Pangan Aman Sekolah (GPAS), Gerakan Keamanan Pangan Desa, serta edukasi keamanan jajanan melalui Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Di ranah digital, kampanye “Cek KLIK” dan konten edukasi di media sosial Balai POM di Bogor menjangkau lebih dari 10.000 pengguna secara kumulatif.

6. Peningkatan Komitmen Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Publik.

Reformasi birokrasi nasional dan pelaksanaan SAKIP yang semakin terukur memberikan peluang bagi Balai POM di Bogor untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas. Kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik) khususnya pada isu “Percepatan Penurunan Stunting” dan “Peningkatan Investasi” memungkinkan Balai POM berkontribusi langsung dalam mendukung kesehatan masyarakat dan daya saing produk lokal. Selain itu, penerapan *Performance Based Budgeting* dan sistem monitoring digital Badan POM memungkinkan Balai POM di Bogor meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program secara lebih akurat dan transparan. Peluang ini mendukung terbentuknya organisasi yang berorientasi hasil (*result-oriented institution*) dengan kinerja yang dapat diukur secara objektif.

7. Dukungan Program Nasional Ketahanan Pangan dan Kesehatan Masyarakat.

Isu ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas nasional yang relevan dengan tugas Balai POM di Bogor. Program pemerintah seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menyediakan ruang kolaborasi lintas sektor. Melalui keterlibatan aktif dalam program tersebut, Balai POM di Bogor dapat memperkuat peran strategisnya dalam memastikan keamanan pangan sejak hulu hingga hilir, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya poin 2 (Zero Hunger) dan poin 3 (Good Health and Well-Being). Keterlibatan aktif dalam program-program ini juga memperkuat citra lembaga sebagai mitra pembangunan yang berorientasi pada perlindungan konsumen.

8. Tren *Green Building* dan *Sustainability*.

Kebijakan pemerintah terkait *Green Government Building* membuka peluang bagi Balai POM di Bogor untuk mewujudkan konsep *green laboratory and building*. Konsep ini tidak hanya mendukung efisiensi energi dan pengelolaan limbah laboratorium yang ramah lingkungan, tetapi juga memperkuat komitmen lembaga terhadap prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Dengan dukungan kebijakan nasional, Balai POM di Bogor dapat menjadi model percontohan pembangunan fasilitas laboratorium publik yang efisien dan berorientasi lingkungan, yang sejalan dengan Agenda Sustainable Development Goals 2030.

1.2.4 Analisis Ancaman (Threats)

Meskipun lingkungan strategis nasional dan regional memberikan berbagai peluang bagi penguatan pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Bogor juga dihadapkan pada sejumlah ancaman eksternal yang dapat memengaruhi kinerja organisasi dan keberlanjutan program. Ancaman tersebut bersumber dari dinamika teknologi, globalisasi perdagangan, perubahan iklim, serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Identifikasi ancaman ini penting untuk menyusun strategi mitigasi dan adaptasi jangka menengah yang realistis dan responsif.

1. Perkembangan Teknologi yang Cepat dan Risiko Penyalahgunaan Digital.

Percepatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, ia memberikan peluang besar bagi peningkatan efisiensi pengawasan; namun di sisi lain, membuka ruang baru bagi penyalahgunaan sistem digital oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Munculnya praktik perdagangan obat dan makanan ilegal melalui platform daring, penjualan produk tanpa izin edar, serta penyebaran hoaks kesehatan merupakan ancaman serius yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan. Selain itu, risiko *cyber attack* terhadap sistem informasi internal dan data hasil laboratorium dapat mengganggu integritas data dan menimbulkan kebocoran informasi sensitif. Dalam konteks ini, Balai POM di Bogor harus memperkuat kapasitas *cyber resilience* (kemampuan suatu organisasi untuk mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari serangan atau gangguan siber, sehingga layanan tetap berjalan meskipun terjadi insiden keamanan digital), keamanan data, serta kemampuan monitoring digital agar dapat mengantisipasi ancaman kejahatan siber di sektor obat dan makanan.

2. Meningkatnya Kompleksitas Produk dan Inovasi di Sektor Farmasi dan Pangan.

Kemajuan teknologi industri telah mendorong munculnya berbagai inovasi produk baru, seperti produk kombinasi (*combination product*), obat berbasis bioteknologi, dan pangan fungsional (*functional food*). Namun, inovasi ini sering kali melampaui kecepatan adaptasi regulasi dan kemampuan uji laboratorium di tingkat UPT. Ketidakseimbangan antara laju inovasi industri dengan kapasitas pengawasan dapat menyebabkan kesenjangan pengendalian mutu dan risiko keamanan. Selain itu, fenomena meningkatnya produk *borderline* (antara kosmetik dan obat tradisional, atau antara pangan dan suplemen) menimbulkan tantangan baru dalam klasifikasi dan pengawasan, yang dapat menyebabkan tumpang tindih regulasi antarinstansi. Jika tidak diantisipasi melalui penguatan kapasitas teknis dan regulasi adaptif, kondisi ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan Balai POM di Bogor dalam memastikan keamanan produk yang beredar.

3. Perubahan Iklim dan Risiko terhadap Keamanan Pangan.

Perubahan iklim global telah menjadi salah satu ancaman signifikan terhadap sistem pangan nasional. Kenaikan suhu, perubahan pola hujan, dan bencana alam berdampak langsung pada mutu bahan baku pangan, peningkatan kontaminasi mikrobiologi, serta risiko cemaran kimia dan logam berat. Berdasarkan kajian Kementerian Kesehatan dan RCCC-UI, penyakit seperti DBD, diare, dan ISPA cenderung meningkat akibat perubahan iklim, yang berimplikasi pada meningkatnya permintaan obat dan suplemen. Kondisi ini berpotensi dimanfaatkan oleh produsen dan pedagang untuk memasarkan produk obat atau pangan tanpa izin, termasuk produk yang mengandung bahan berbahaya. Bagi Balai POM di Bogor, perubahan iklim menuntut penguatan fungsi laboratorium dan respons darurat karena jenis cemaran dan pola risiko produk pangan dapat berubah lebih cepat. Meningkatnya suhu dan kelembaban memicu pertumbuhan bakteri, jamur, atau toksin baru sehingga laboratorium perlu mampu melakukan uji terhadap cemaran biologis dan kimia yang muncul akibat kondisi iklim ekstrem. Selain itu, perubahan iklim dapat menyebabkan kejadian pangan berisiko (*food safety incidents*) seperti keracunan massal atau kontaminasi bahan baku, sehingga Balai POM perlu memiliki kapasitas respon cepat baik dalam hal pengujian sampel, investigasi lapangan, koordinasi lintas sektor, maupun penyampaian informasi risiko kepada masyarakat. Dengan kata lain, perubahan iklim meningkatkan kebutuhan Balai POM untuk memperkuat kemampuan deteksi dini, analisis risiko, dan mitigasi terhadap insiden keamanan pangan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

4. Pertumbuhan Perdagangan Online dan Distribusi Produk Ilegal.

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia, termasuk di wilayah Bogor dan Depok, menghadirkan tantangan besar bagi sistem pengawasan. Platform daring mempermudah peredaran produk ilegal, terutama kosmetik, obat pelangsing, dan suplemen tanpa izin edar. Karakteristik transaksi digital yang lintas wilayah, bersifat anonim, dan sulit dilacak menjadikan pengawasan konvensional tidak lagi efektif. Balai POM di Bogor berpotensi menghadapi lonjakan kasus pelanggaran daring yang memerlukan mekanisme pemantauan berbasis teknologi (*digital surveillance*). Jika tidak segera diantisipasi melalui kerja sama lintas instansi (Kemenkominfo, kepolisian, dan pemerintah daerah), ancaman ini dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat sekaligus menurunkan citra lembaga sebagai pengawas yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Selama periode Januari hingga Oktober 2025, Balai POM di Bogor selalu tepat waktu dalam melakukan pelaporan mengenai Analisis Penelusuran Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

5. Belum Maksimalnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Regulasi.

Meskipun tingkat kesadaran masyarakat meningkat, kepatuhan pelaku usaha terutama di kalangan UMKM pangan olahan dan obat tradisional masih menjadi persoalan. Sebagian besar pelaku usaha mikro belum sepenuhnya memahami prosedur izin edar, standar produksi yang baik (CPPOB/CPPKB) dan prinsip labelisasi yang benar. Keterbatasan pengetahuan ini sering kali menyebabkan pelanggaran administratif maupun substansial yang berulang. Jika tidak dibarengi dengan sistem pembinaan yang kuat, rendahnya kepatuhan pelaku usaha dapat menghambat tujuan pembinaan industri lokal yang aman dan berdaya saing. Selain itu, meningkatnya aktivitas usaha *home industry* pasca pandemi memperbesar risiko beredarnya produk tanpa pengawasan yang memadai. Selama tahun 2024, dari 714 sarana sebanyak 692 sarana sudah memenuhi ketentuan.

6. Dinamika Politik dan Perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Kebijakan pemerintah daerah yang berubah-ubah, terutama terkait prioritas pembangunan kesehatan dan ketahanan pangan, dapat memengaruhi kesinambungan kerja sama lintas sektor. Pergantian kepala daerah atau perubahan arah politik sering kali berdampak pada keberlanjutan program bersama, seperti Pasar Aman dari Bahan Berbahaya atau Gerakan Keamanan Pangan Desa. Kondisi ini menuntut Balai POM di Bogor untuk memiliki strategi diplomasi kebijakan dan komunikasi lintas sektor yang adaptif agar tetap dapat menjaga kesinambungan sinergi antarinstansi. Tanpa manajemen komunikasi yang baik, dinamika kebijakan daerah dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan program prioritas pengawasan obat dan makanan.

7. Ketidakpastian Ekonomi Global dan Krisis Pasokan Bahan Baku.

Krisis global, seperti fluktuasi harga bahan baku farmasi dan pangan, dapat berdampak pada rantai pasok nasional dan meningkatkan risiko penggunaan bahan substitusi yang tidak memenuhi standar keamanan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beredarnya produk palsu, substandar, atau ilegal di pasaran. Balai POM di Bogor sebagai pengawas di tingkat daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan untuk mendeteksi perubahan pola distribusi dan potensi pelanggaran yang timbul akibat tekanan ekonomi global. Tanpa mekanisme mitigasi yang kuat, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas pengawasan dan perlindungan konsumen di tingkat lokal.

Tabel 1.3 Matriks Ringkas Analisis SWOT

Strengths	Weakness
1. Penguatan Kelembagaan melalui Transformasi Organisasi 2. Implementasi Sistem. Manajemen Mutu dan Akreditasi Laboratorium. 3. SDM Profesional dan Berorientasi Reformasi Birokrasi. 4. Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja yang Tinggi. 5. Komitmen terhadap Pengawasan Berbasis Risiko dan Bukti (<i>Evidence-Based Supervision</i>). 6. Kolaborasi Strategis dengan Pemerintah Daerah dan Pentahelix. 7. Infrastruktur Laboratorium dan Teknologi yang Semakin Lengkap. 8. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengawasan Internal. 9. Komitmen terhadap Inovasi dan Adaptasi Teknologi Digital. 10. Citra dan Kepercayaan Publik yang Meningkat.	1. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia. 2. Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan Manajemen Risiko dan Kinerja. 3. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Penunjang Operasional. 4. Belum Tersedianya Sistem Tanggap Darurat (<i>Early Warning System</i>) Pengawasan. 5. Keterbatasan Dukungan Sumber Daya untuk Pelaksanaan Operasional . 6. Ketergantungan terhadap Sistem Pusat dalam Pengelolaan Data dan Aplikasi. 7. Kapasitas Komunikasi Publik dan Edukasi yang Masih Terbatas. 8. Masih Diperlukan Penguatan Koordinasi Internal dan Eksternal. 9. Kapasitas Penelitian, Kajian, dan Inovasi Terapan yang Masih Rendah.

Opportunities	Threats
1. Dukungan Kebijakan Nasional terhadap Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Perkembangan Teknologi Digital dalam Pengawasan dan Pelayanan Publik. 3. Pertumbuhan UMKM dan Industri Pangan serta Obat Tradisional. 4. Kolaborasi Pentahelix dan Sinergi dengan Pemerintah Daerah. 5. Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. 6. Peningkatan Komitmen Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Publik. 7. Dukungan Program Nasional Ketahanan Pangan dan Kesehatan Masyarakat. 8. Tren <i>Green Building</i> dan <i>Sustainability</i>.	1. Perkembangan Teknologi yang Cepat dan Risiko Penyalahgunaan Digital. 2. Meningkatnya Kompleksitas Produk dan Inovasi di Sektor Farmasi dan Pangan. 3. Perubahan Iklim dan Risiko terhadap Keamanan Pangan. 4. Pertumbuhan Perdagangan Online dan Distribusi Produk Ilegal. 5. Belum Maksimalnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Regulasi. 6. Dinamika Politik dan Perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah. 7. Ketidakpastian Ekonomi Global dan Krisis Pasokan Bahan Baku.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1. Visi

Balai POM di Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung
masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju
menuju Indonesia Emas 2045."

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM

terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

Balai POM di Bogor sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM tahun 2025-2029.

2.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan

- penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
 3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
 4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
 5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Balai POM di Bogor sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM. Berbagai tujuan BPOM tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu.	74,75	76,4	77,75	79,45	80,7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.	88,20	88,60	88,90	89,20	89,40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	63,6	66,2	69,3	72,7	76,7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	74,4	75,9	77,1	78,5	79,9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.	Indeks RB BPOM.	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5

2.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Bogor, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Bogor akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO;
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar;
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder;
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;

- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan;
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar;
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT;
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium;
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman;
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE.

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
- c. Jumlah desa pangan aman;
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan

perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima.

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut

dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM;
- b. Nilai AKIP UPT BPOM;
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Bogor periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu. <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu.</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu.</i> <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025).</i> <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029).</i> <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. <i>Indikator:</i> <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.</i> <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.</i> <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.</i> <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.</i> <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.</i> 6. <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan.</i>	6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.</i> 7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.</i> 12. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.</i> 13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.</i> 14. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			<i>UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.</i> 15. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang didampangi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.</i> 16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029).</i>
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi. <i>Indikator:</i> <i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT. <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.</i>
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			<i>Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM. <i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. <i>Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan.</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu. <i>Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan.</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.	Meningkatnya efektivitas KIE. <i>Indikator: 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
seluruh pemangku kepentingan.	<i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.</i>	<i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.</i>	2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. 3. Jumlah desa pangan aman. 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima. <i>Indikator: Indeks RB BPOM.</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima. <i>Indikator: Indeks RB BPOM.</i>	Layanan Publik UPT yang prima.
			<i>Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT.</i> Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal. <i>Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM. 2. Nilai AKIP UPT BPOM. 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM. 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.</i>

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Bogor

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN RISIKO
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.	Ketidakefektifan pengawasan akibat keterbatasan cakupan sampling prioritas, ketimpangan sumber daya pengawasan, serta belum optimalnya penerapan pengawasan berbasis risiko pada seluruh komoditas.	Penguatan sistem pengawasan berbasis risiko 5 tahunan melalui peningkatan cakupan sampling prioritas, penyempurnaan analisis risiko komoditas, serta penguatan kapasitas SDM pengawasan.	Tim Sampling.
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor.	Rendahnya tingkat tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh pemangku kepentingan karena lemahnya koordinasi lintas sektor dan variasi tingkat komitmen pemerintah daerah.	Pemantapan mekanisme koordinasi lintas sektor melalui forum reguler, penyusunan protokol tindak lanjut, serta penguatan kerja sama formal (MoU/ PKS).	Tim Pemeriksaan.
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Tidak optimalnya proses pemeriksaan sarana akibat jumlah sarana yang terus bertambah, terbatasnya pemeriksa, serta beragamnya tingkat kepatuhan pelaku usaha.	Penerapan pemeriksaan sarana berbasis risiko, peningkatan kompetensi pemeriksa, dan pemanfaatan aplikasi pendataan sarana terintegrasi.	Tim Pemeriksaan.
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.	Rendahnya pemenuhan standar fortifikasi oleh pelaku usaha karena kurangnya pemahaman, terbatasnya sarana uji, dan minimnya pelaporan produksi fortifikasi.	Penguatan intensitas sampling fortifikasi, peningkatan kapasitas laboratorium prioritas fortifikasi, serta koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan industri.	Tim Pemeriksaan.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN RISIKO
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.	Keterbatasan kapasitas laboratorium (alat, SDM, validasi metode) sehingga berdampak pada ketepatan waktu, mutu hasil uji, dan dukungan terhadap pengawasan.	Pengembangan laboratorium secara multi-tahun, peremajaan peralatan, sertifikasi analis, dan percepatan pemenuhan standar akreditasi.	Tim Pengujian.
6	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di masing-masing wilayah kerja UPT.	Rendahnya efektivitas KIE akibat rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kanal komunikasi, serta kurangnya segmentasi pesan berbasis data.	Penguatan strategi KIE multi-platform, pemanfaatan data perilaku konsumen, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas.	Tim Infokom.
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.	Rendahnya kesiapan UMKM dalam penerapan standar keamanan dan mutu akibat keterbatasan fasilitas produksi, kompetensi, dan pemahaman regulasi.	Pendampingan UMKM secara bertahap, penyusunan modul standar mutu, serta sinergi intensif dengan dinas perindustrian/koperasi.	Tim Sertifikasi.
8	Terlaksananya penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.	Tingginya dinamika peredaran obat/pangan ilegal karena modus kejahatan kompleks, lintas wilayah, dan membutuhkan kemampuan investigasi khusus.	Penguatan intelijen pengawasan, peningkatan kapasitas investigasi, serta kerja sama dengan APH dalam penegakan hukum.	Tim Penindakan.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN RISIKO
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif.	Pertumbuhan cepat perdagangan online ilegal yang sulit terdeteksi tanpa teknologi pemantauan siber yang memadai dan SDM digital forensics.	Pengembangan sistem cyber patrol, peningkatan kemampuan SDM investigasi digital, serta kolaborasi dengan penyedia platform e-commerce.	Tim Penindakan.
10	Layanan Publik UPT yang prima.	Kualitas layanan publik tidak konsisten karena kurangnya standar layanan berbasis digital, mekanisme pengaduan yang belum terintegrasi, dan variasi kompetensi frontliner.	Penguatan SOP layanan publik, digitalisasi layanan pengaduan, dan peningkatan kompetensi petugas layanan.	Tim Infokom.
11	Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal.	Lemahnya implementasi tata kelola, SPIP, dan SAKIP akibat kurangnya integrasi perencanaan-penganggaran-pelaporan serta ketidakpatuhan terhadap regulasi.	Penguatan SPIP & SAKIP secara menyeluruh, peningkatan kapasitas pengelola perencanaan dan pelaporan, serta penyempurnaan SOP tata kelola.	Tim Tata Usaha.

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu Arah Kebijakan dan Strategi Unit

Organisasi/Satker yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa

lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.	Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>post market</i> sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> .	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun

RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi/Strategi

Balai POM di Bogor mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

- a. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis;
- b. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*;
- c. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;
- d. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- e. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- f. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- g. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan Badan POM Tahun 2025–2029, Balai POM di Bogor menetapkan strategi pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, serta tantangan di wilayah kerja. Strategi ini dirumuskan untuk mengakomodir kebijakan nasional sekaligus memenuhi kebutuhan penguatan fungsi pengawasan, pembinaan pelaku usaha, dan pelayanan publik di tingkat UPT. Strategi Balai POM di Bogor antara lain:

1. Optimalisasi pengawasan berbasis risiko, intensifikasi sampling komoditas prioritas daerah, pemanfaatan digital tools pengawasan, serta penguatan analisis data untuk deteksi dini potensi pelanggaran.
2. Peningkatan koordinasi penindakan dengan aparat penegak hukum, intensifikasi patroli siber, pengawasan peredaran fisik, serta penegakan

hukum yang cepat berbasis temuan analis risiko dan hasil uji laboratorium.

- 3. Perluasan asistensi dan bimbingan teknis kepatuhan regulasi bagi UMKM, fasilitasi pemenuhan CPPOB/CPPOTB/CPPKRTB, serta pendampingan percepatan pemenuhan persyaratan izin edar.
- 4. Penguatan program KIE, pemberdayaan kader keamanan pangan, optimalisasi kanal digital edukasi publik, serta perluasan jejaring masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan partisipatif.
- 5. Penguatan forum koordinasi daerah, kerja sama dengan Pemda, akademisi, dan aparat penegak hukum, serta partisipasi dalam jejaring kemitraan nasional untuk pengawasan lintas sektor.
- 6. Pengembangan kompetensi pengawas dan analis, peningkatan keandalan laboratorium, penyusunan analisis kebijakan berbasis data, serta percepatan digitalisasi proses pengawasan.
- 7. Optimalisasi tata kelola internal, percepatan layanan publik berbasis aplikasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan budaya integritas serta layanan prima.

Tabel 3.2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Bogor Tahun 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.	Optimalisasi pengawasan berbasis risiko, intensifikasi sampling komoditas prioritas daerah, pemanfaatan digital tools pengawasan, serta penguatan analisis data untuk deteksi dini potensi pelanggaran.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> .	Peningkatan koordinasi penindakan dengan aparat penegak hukum, intensifikasi patroli siber, pengawasan peredaran fisik, serta penegakan hukum yang cepat berbasis temuan analis risiko dan hasil uji laboratorium.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Perluasan asistensi dan bimbingan teknis kepatuhan regulasi bagi UMKM, fasilitasi pemenuhan CPPOB/CPPOTB/CPPKRTB, serta

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	pendampingan percepatan pemenuhan persyaratan izin edar.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan program KIE, pemberdayaan kader keamanan pangan, optimalisasi kanal digital edukasi publik, serta perluasan jejaring masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan partisipatif.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan forum koordinasi daerah, kerja sama dengan Pemda, akademisi, dan aparat penegak hukum, serta partisipasi dalam jejaring kemitraan nasional untuk pengawasan lintas sektor.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Pengembangan kompetensi pengawas dan analis, peningkatan keandalan laboratorium, penyusunan analisis kebijakan berbasis data, serta percepatan digitalisasi proses pengawasan.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Optimalisasi tata kelola internal, percepatan layanan publik berbasis aplikasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan budaya integritas serta layanan prima.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Unit Organisasi/Satker Balai POM di Bogor juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2.1 Program dan Kegiatan

A. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia.

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi strategi Balai POM di Bogor dalam mendukung arah kebijakan Badan POM. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berkhasiat. Pengawasan dilaksanakan secara menyeluruh, mencakup pengawasan pra-edar (pre-market) dan pasca-edar (post-market) terhadap sediaan farmasi, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, serta pangan olahan, termasuk pengawalan terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam rangka menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, pengawasan pre-market control dilakukan dalam lingkup

kewenangan tertentu yang tidak mencakup penyusunan standar, namun meliputi kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pelayanan publik, serta sertifikasi sarana. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip Cara Produksi yang Baik (CPOB/CPPKB/CPOTB) dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga mutu dan keamanan produk terjaga hingga ke tangan konsumen.

Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi dilaksanakan secara rutin berdasarkan analisis risiko dan prioritas pengawasan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud sistem pengawasan yang lebih efektif, terukur, dan berbasis data. Selain itu, Balai POM di Bogor juga berperan aktif dalam pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha serta memastikan pemenuhan ketentuan teknis sesuai standar nasional. Dalam mendukung proses sertifikasi, Balai POM di Bogor melakukan pendampingan, fasilitasi desk Corrective and Preventive Action (CAPA), serta koordinasi berkelanjutan dengan Badan POM.

Kegiatan pengawasan juga didukung dengan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha. Melalui kegiatan KIE, Balai POM di Bogor berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih dan menggunakan obat serta makanan yang aman dan bermutu. Program KIE dilaksanakan melalui berbagai media, baik tatap muka maupun digital, dengan mengusung kampanye “Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa)” serta inisiatif edukatif lainnya seperti Sahabat POM dan Sekolah Pangan Aman. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih waspada, mandiri, dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan obat dan makanan.

Dalam aspek sampling dan pengujian produk, Balai POM di Bogor melaksanakan kegiatan secara terencana dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based sampling) serta metode purposive targeted dan acak (random sampling). Hasil pengujian dari laboratorium yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025 menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pembinaan maupun penindakan. Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) turut memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan hasil pengawasan.

Sebagai bagian dari penegakan hukum, Balai POM di Bogor melaksanakan penindakan terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik melalui penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Kegiatan penindakan dilakukan secara selektif dan proporsional berdasarkan hasil kajian risiko dan prioritas pelanggaran. Melalui penegakan hukum yang tegas, diharapkan muncul efek jera bagi pelaku

pelanggaran serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi.

Dengan demikian, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Bogor tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan, edukasi, advokasi, dan kolaborasi lintas sektor. Balai POM di Bogor berperan aktif dalam membangun sinergi dengan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat guna mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

B. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Balai POM di Bogor.

Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) di Balai POM di Bogor bertujuan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan melalui tata kelola sumber daya yang efisien, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini mencakup pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja pegawai, pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor serta laboratorium, dan penyediaan fasilitas pendukung kinerja pegawai.

Pengelolaan BMN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan prinsip tertib administrasi dan akuntabilitas. Balai POM di Bogor menerapkan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi untuk memastikan seluruh aset tercatat dengan akurat, dimanfaatkan secara optimal, dan diawasi secara berkala. Kegiatan pemeliharaan sarana dan peralatan laboratorium dilakukan secara terencana untuk menjamin keandalan peralatan uji dan menjaga keberlangsungan operasional pengawasan.

Selain itu, Balai POM di Bogor berkomitmen meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana penunjang pengawasan, termasuk modernisasi peralatan laboratorium, penataan ruang kerja yang ergonomis, serta penyediaan fasilitas kerja sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kegiatan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas pegawai sekaligus menjaga mutu hasil kerja yang dihasilkan oleh Balai POM di Bogor.

Dalam aspek tata kelola, pengelolaan sarpras diintegrasikan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran. Setiap tahapan pengelolaan dilakukan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terukur. Melalui integrasi ini, pengelolaan sarpras tidak

hanya menjadi kegiatan pendukung administratif, tetapi juga instrumen penguat akuntabilitas kinerja lembaga.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan sarpras merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM, khususnya dalam aspek penguatan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui tata kelola sarpras yang baik, Balai POM di Bogor berupaya mewujudkan lingkungan kerja yang produktif, aman, dan efisien, serta mendukung terwujudnya pengawasan obat dan makanan yang responsif, adaptif, dan berorientasi hasil. Dengan demikian, pengelolaan sarpras menjadi pilar penting dalam menjamin keberlangsungan operasional Balai POM di Bogor dalam melaksanakan peran strategisnya melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar.

BAB 4
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja yang akan menjadi sasaran akhir Balai POM di Bogor dalam memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran kegiatan Balai POM di Bogor, serta indikator kinerja dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai POM di Bogor selama periode lima tahun. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di Balai POM di Bogor diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1 Matriks Kinerja Balai POM di Bogor 2025-2029

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	82,5	84	85,5	87	88,5
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.	26	27	28	29	30
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	75	77	79	81	83

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.	100	100	100	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	85	87	89	92	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.	88	88,5	89	89,5	90
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	86,33	87,67	89	90,33	91,67
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	88	90	91	92	93
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	96,5	97,5	98,5	99	99,5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	90	91	92	93	94
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.	86,80	88,60	90,80	92,60	94,40
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.	80	81	82	83	84
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.	100	100	100	100	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.	14	16	19	22	25
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.	33,33	66,67	100	100	100
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.		81	82	83	84

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi.	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	63	63	63	75	75
3	Meningkatnya efektivitas KIE.	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.	83,96	84,80	85,64	86,48	87,32
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.	4	5	5	5	5
		Jumlah desa pangan aman.	1	2	3	3	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.	1	1	1	1	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan.	17,43	35,78	55,05	77,06	100
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.	80	81	82	83	84
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi	90	91	92	93	94

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.	dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.					
7	Layanan Publik UPT yang Prima.	Indeks Pelayanan Publik UPT.	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.	77	78	79	80	81
		Nilai AKIP UPT BPOM.	79,5	80	80,5	81	81,5
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.	4	4	4	4	4
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.	2,6	2,7	2,8	2,9	3

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai POM di Bogor Berdasarkan Kegiatan Tahun 2025-2029

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia.	4.667,4	11.530,3	30.069,3	13.225,6	14.548,2
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM.	5.107,1	5.532,7	6.086,0	6.694,6	7.364,0
Total	9.774,5	17.063,0	36.155,3	19.920,2	21.912,2

Sumber: DIPA Awal TA 2025 (2 Desember 2024) dan Usulan Kebutuhan Anggaran TA 2026

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai POM di Bogor Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2025-2029

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM).	9.774,5	17.063,0	36.155,3	19.920,2	21.912,2
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	-	-	-	-	-
Total	9.774,5	17.063,0	36.155,3	19.920,2	21.912,2

Sumber: DIPA Awal TA 2025 (2 Desember 2024) dan Usulan Kebutuhan Anggaran TA 2026

BAB 5 PENUTUP

Rencana Strategis Balai POM di Bogor Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam mengarahkan seluruh kegiatan dan kebijakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Bogor agar selaras dengan arah kebijakan strategis Badan POM secara nasional. Dokumen ini menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Balai POM di Bogor untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada sinergi dan partisipasi aktif seluruh pegawai serta dukungan dari para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, Balai POM di Bogor berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selama periode pelaksanaan Renstra 2025–2029, Balai POM di Bogor akan senantiasa melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian terhadap pelaksanaan strategi dan program agar tetap relevan dengan dinamika kebijakan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

Melalui implementasi Rencana Strategis ini, diharapkan Balai POM di Bogor dapat mewujudkan kinerja yang unggul, memperkuat peran sebagai pelaksana pengawasan obat dan makanan yang andal, serta berkontribusi nyata dalam perlindungan kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, Rencana Strategis Balai POM di Bogor Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi landasan yang kokoh bagi terwujudnya Balai POM di Bogor yang profesional, berintegritas, dan responsif, dalam rangka mendukung visi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM DI BOGOR TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Bogor.								10.045,4	10.122,6	10.628,7	11.160,1	11.718,1	UPT BPOM.	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia.								4.690,9	4.664,8	4.898,0	5.142,9	5.400,1	UPT BPOM.	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.												UPT BPOM.	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Bogor.	82,5	84	85,5	87	88,5						UPT BPOM.
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.	Balai POM di Bogor.	26	27	28	29	30						UPT BPOM.
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Bogor.	75	77	79	81	83						UPT BPOM.
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.	Balai POM di Bogor.	100	100	100	100	100						UPT BPOM.
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang	Balai POM di Bogor.	85	87	89	92	95						UPT BPOM.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan.												
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.	Balai POM di Bogor.	88	88,5	89	89,5	90						UPT BPOM.
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Bogor.	86,33	87,67	89	90,33	91,67						UPT BPOM.
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Bogor.	88	90	91	92	93						UPT BPOM.
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Bogor.	96,5	97,5	98,5	99	99,5						UPT BPOM.
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Bogor.	90	91	92	93	94						UPT BPOM.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.	Balai POM di Bogor.	86,8	88,6	90,8	92,6	94,40						UPT BPOM.
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.	Balai POM di Bogor.	80	81	82	83	84						UPT BPOM.
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.	Balai POM di Bogor.	100	100	100	100	100						UPT BPOM.
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.	Balai POM di Bogor.	14	16	19	22	25						UPT BPOM.
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.	Balai POM di Bogor.	33,33	66,67	100	100	100						UPT BPOM.
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Bogor.	0	81	82	83	84						UPT BPOM.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana	
								(Dalam Juta Rupiah)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans.	Balai POM di Bogor.	45	45	45	45	45							UPT BPOM.
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT.	Balai POM di Bogor.	100	100	100	100	100							UPT BPOM.
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT.	Balai POM di Bogor.	301	304	320	336	355							UPT BPOM.
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT.	Balai POM di Bogor.	89	114	130	150	173							UPT BPOM.
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT.	Balai POM di Bogor.	277	300	335	372	411							UPT BPOM.
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM.	Balai POM di Bogor.	0	144	144	144	144							UPT BPOM.
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.	Balai POM di Bogor.	0	0	1	1	1							UPT BPOM.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.		Balai POM di Bogor.	1	1	1	1	1						UPT BPOM.
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.		Balai POM di Bogor.	1	1	1	1	1						UPT BPOM.
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar.		Balai POM di Bogor.	0	634	634	634	634						UPT BPOM.
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.													UPT BPOM.
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Bogor.	63	63	63	75	75						UPT BPOM.
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT.		Balai POM di Bogor.	5	5	5	6	6						UPT BPOM.
	Meningkatnya efektivitas KIE													UPT BPOM.
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan	Balai POM di Bogor.	83,96	84,80	85,64	86,48	87,32						UPT BPOM.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.												
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.	Balai POM di Bogor.	4	5	5	5	5						UPT BPOM.
	3	Jumlah desa pangan aman.	Balai POM di Bogor.	1	2	3	3	3						UPT BPOM.
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.	Balai POM di Bogor.	1	1	1	1	1						UPT BPOM.
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE.		Balai POM di Bogor.	95	360	432	518	622						UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan.
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT.		Balai POM di Bogor.	19	8	11	14	16						UPT BPOM.
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.		Balai POM di Bogor.	4	5	5	5	5						UPT BPOM.
	RO 4: Desa Pangan Aman.		Balai POM di Bogor.	1	2	3	3	3						UPT BPOM.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.		Balai POM di Bogor.	1	1	1	1	1						UPT BPOM.
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.													UPT BPOM.
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.	Balai POM di Bogor.	17,43	35,78	55,05	77,06	100						UPT BPOM.
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT.		Balai POM di Bogor.	19	20	21	24	25						UPT BPOM.
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.													UPT BPOM.
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.	Balai POM di Bogor.	80	81	82	83	84						UPT BPOM.
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan.		Balai POM di Bogor.	2	2	2	2	3						UPT BPOM.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana	
									(Dalam Juta Rupiah)						
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.													UPT BPOM.	
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.	Balai POM di Bogor.	90	91	92	93	94							UPT BPOM.
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT.		Balai POM di Bogor.	14	14	15	15	15							UPT BPOM.
	Layanan Publik UPT yang prima.														UPT BPOM.
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT.	Balai POM di Bogor.	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6							UPT BPOM.
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT.		Balai POM di Bogor.	184	225	251	274	302							UPT BPOM.
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.														UPT BPOM.
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.	Balai POM di Bogor.	77	78	79	80	81							UPT BPOM dan Direktorat

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
														Kedeputian 1,2,3,4.
	2	Nilai AKIP UPT BPOM.	Balai POM di Bogor.	79,5	80	80,5	81	81,5						UPT BPOM.
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.	Balai POM di Bogor.	4	4	4	4	4						UPT BPOM.
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.	Balai POM di Bogor.	2,6	2,7	2,8	2,9	3						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4.
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan.		Balai POM di Bogor.	1	1	1	1	1						UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4.
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia.		Balai POM di Bogor.	1	0	1	1	1						UPT BPOM.
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi.		Balai POM di Bogor.	6	0	10	5	10						UPT BPOM.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM.							5.354,5	5.457,8	5.730,6	6.017,2	6.318,0	UPT BPOM.	
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal".	Balai POM di Bogor.	1	1	1	1	1						UPT BPOM.
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal".	Balai POM di Bogor.	1	1	1	1	1						UPT BPOM.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BOGOR,



JEFFETA PRADEKO PUTRA